

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Provinsi Sumatera Utara

Dalam Lensa

TRIWULAN II 2016

Tim Penyusun



PENANGGUNG JAWAB	: KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA DRS. JUMSADI DAMANIK, SH, M.HUM
KETUA	: KABID APLIKASI TELEMATIKA DINAS KOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA DRA. ELI SUHAERİYAH, M.SI
WAKIL KETUA	: KASI SEKSI PUSAT INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, SSTP, M.SI
SEKRETARIS	: MULIDA
KONSULTAN	: DRA. YUSNIARTI PILIANG
EDITOR	: DINI SYILVIA MAISYAROH, SP SOLATIAH NASUTION, SH
OPERATOR	: NURIN, S.KOM NUR KADUHAN, SE
REPORTER	: HUMAS PEMPROVSU SRY WAHYUNI SARAGIH SUDARTO
KAMERAMEN	: DEDE DARMA SIAGIAN, S.KOM M. ICHSAN HIDAYAT, S.KOM SAIDIL BAYAN LUBIS, S.KOM LINTANG PRIADI PURBA, AMD RISKI HANDRIAN
FOTOGRAFER	: CANDRA SEGER, SE KHAIRUL HIFZI, ST MUNAWAR HARAHAP, SH R. MUHAMMAD IRVAN RIDHO, S.Ti RIZKY HENDARTA TAMIN DAMANIK

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho_Nya, maka buku "Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Dalam Lensa" dapat disusun. Buku ini merupakan dokumentasi foto yang disertai berita kegiatan sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2016.

Penyusunan buku ini merupakan salah satu capaian dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik khususnya Kegiatan Operasional Pusat Informasi Publik dan Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik yang didasarkan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika membuka diri dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media buku ini.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif dalam penyusunan buku ini. Kami berharap semoga kehadiran buku ini dapat membawa manfaat kepada para pembaca sekalian

Medan, Juni 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

APRIL

- 20160401 Menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provsu
- 20160401 Mendampingi Observasi Lapangan Peserta Diklat Implementasi *e-Procurement* bagi Aparatur Pemda
- 20160408 Menerima Audiensi Kepala Perwakilan Redaksi Bhayangkara Utama Sumut
- 20160408 Menerima Audiensi Redaksi Tabloid Purnawirawan Polri
- 20160408 Menerima Audiensi Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI)
- 20160410 Menghadiri Acara Malam Pagelaran Seni & Budaya Pemko Pematangsiantar
- 20160412 Menghadiri Peresmian Kantor Pemasaran Data *Script* Medan
- 20160412 Membuka Rapat Akhir Tahun Koperasi Pegawai Republik Indonesia (RAT-KPRI) Media Diskominfo Provsu Tahun Buku 2015
- 20160412 Penilaian Foto Bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jodi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke-68 Tahun 2016
- 20160414 Menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 20160415 Menghadiri Sidang Pangjurnalistik DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Peringatan Hari Jodi Pemprovsu ke-68
- 20160415 Membuka Rapat Rekapitulasi Penilaian Lomba Karya Tulis dalam rangka HUT Pemprovsu ke-68
- 20160418 Menjadi Pembina Upacara Bendera 17-an
- 20160419 Rapat *Technical Meeting* Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten dan Kota Tahun 2016
- 20160420 Menghadiri Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
- 20160420 Menutup Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
- 20160421 Menghadiri Sosialisasi dan Edukasi Kedangan di Lingkungan Sekda Provsu
- 20160421 Menghadiri Acara Penandatangan MoU Program *Smart Province*
- 20160422 Menghadiri Rapat Koordinasi TPID Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
- 20160423 Membuka Kegiatan *Outbound* Jurnalis Unit Kantor Gubernur Sumatera Utara
- 20160425 Menghadiri Audiensi Himpunan Nazir Wakaf Indonesia (HNWI) Sumatera Utara
- 20160427 Menghadiri Pembukaan Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Sumatera Utara Tahun 2016
- 20160427 Penyerahan Hadiah Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Sumatera Utara Tahun 2016
- 20160427 Menghadiri Peresmian Gereja Oikumene Bahtera Kasih dan Mesjid Al-Hikmah oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo
- 20160428 Menghadiri Bimbingan *Test/Study* Putra Putri Keluarga Anggota Korpri Provsu
- 20160428 Rapat Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 bersama KPK
- 20160429 Mendampingi Sekda Provsu Menerima Audiensi PT. Inalum

MEI

- 20160502 Menghadiri Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional

20160503 Penyerahan Hadiah Lomba Karya Tulis dan Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke-68 Tahun 2016

20160504 Menghadiri Rapat Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provsu Menjelang Ramadhan

20160504 Menghadiri Rapat Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) bersama Komisi A DPRD SU

20160509 Menghadiri Acara Dirgahayu 50 Tahun Harian Medan Pos

20160511 Menerima Kunjungan Kerja Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

20160511 Sosialisasi Kelengkapan Barang dan Jasa Ke Media Cetak Harian Lokal

20160511 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Metro TV

20160515 Menghadiri Pengukuhan Pengurus Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Sumatra Utara Masa Bakti 2016-2021

20160517 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Kunjungan Dubes India Bersama Delegasi Forum Bisnis India

20160517 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi IKA Universitas Sains Malaysia (USM)

20160517 Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Panitia Peresmian Taman Memorial GM Pangabean

20160518 Menghadiri Jamuan Makan Siang Bersama Atase Pertahanan Militer Negara Sahabat

20160519 Mendampingi Sekda Provsu Menerima Audiensi Ombudsman Republik Indonesia

20160519 Memimpin Raker Pembuatan Call Center "112" untuk Sembilan Kabupaten/Kota di Sumut

20160520 Memimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun

20160521 Menghadiri Musyawarah Provinsi ke-10 Palang Merah Indonesia Sumatera Utara

20160527 Menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Kominfo Provinsi se-Indonesia

20160527 Menghadiri Ramah Tamah dan Tepung Tawar atas Pelantikan Menjadi Gubernur Defenitif oleh Presiden RI

20160531 Narasumber Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

JUNI

20160601 Narasumber Dialog Publik Sarasehan Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016

20160601 Membuka Pementasan Pertunjukan Rakyat (Petra) Kabupaten Tapanuli Tengah

20160601 Menghadiri Jamuan Makan Malam Bersama Rombongan Roadshow Membangun Tol Listrik Menuju Provinsi Sumatera Utara Terang

20160602 Menghadiri *Coffee Morning* dalam rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H

20160603 Mengikuti Prosesi Pembuatan Video Ucapan Selamat Berbuka Puasa dan Selamat Hari Raya Idul Fitri

20160603 Narasumber Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Padang Lawas

20160603 Menghadiri Jamuan Makan Malam Bersama Peserta Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafiz-Hafizah (IPQAH) MUI se-Sumatera Utara

20160604 Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sumut

20160607 Pengajian Ramadhan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

20160608 Menghadiri Berbuka Puasa Bersama Forkopimda Provsu, Bupati dan Walikota, Alim Ulama se-Sumatera Utara, Ormas Keagamaan Islam, Pimpinan SKPD dan Instansi Terkait

- 20160609 Membuka Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Perorangan untuk Mengelola Arsip atau Dokumen secara Elektronik
- 20160613 Menerima Audiensi Tim Sosialisasi 1 Juta Domain "Indonesia Go Online" Kementerian Kominfo
- 20160614 Menerima Audiensi Media Online *Focussumut.com*
- 20160614 Menerima Audiensi Media Detektif Monitor Medan
- 20160615 Buka Puasa Bersama dalam rangka Safari Ramadhan 1437 H di Kab. Asahan

- 20160616 Menghadiri Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan/ Penggunaan *Source Code e-Government* Bekerjasama dengan Pemko Surabaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Implementasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumut
- 20160617 Menghadiri Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumut
- 20160623 Menerima *Source Code e-Government* dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI
- 20160628 Mendampingi Gubsu Menerima Kunjungan Kerja Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Mr. Xie Feng





PEMBUKAAN MUSRENBANG SUMUT # PLT GUBSU AJAK BUPATI DAN WALIKOTA SE SUMUT BERSATU BANGUN SUMUT

Medan, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengingatkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk tahun anggaran 2017 dilakukan dengan penajaman, evaluasi dan skala prioritas. Hal itu menghindari tidak terserapnya anggaran sebagaimana yang terjadi pada Tahun Anggaran 2015 hingga mencapai Rp 420 triliun.

Penegasan itu disampaikan Tjahyo Kumolo di hadapan Forum Musrenbang Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Grand Araska, Medan, Jumat (1/4). Hadir dalam kesempatan tersebut Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tenku Erry Nuradi, M.Si Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, para bupati/walikota se Sumatera Utara, FKPD Provsu, DPRD, akademisi dan lain sebagainya.

"Saya tegaskan forum Musrenbang ini adalah bagian dari tahapan perencanaan yang memutuskan penganggaran bagaimana, tema anggaran bagaimana dan pelaksanaannya bagaimana," katanya. Dikatakan Tjahyo Musrenbang 2015 menjadi pelajaran dan evaluasi dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2017. "Musrenbang tahun 2015 cukup bagus, namun menimbulkan pertanyaan. Pertumbuhan ekonomi harusnya bisa lebih tinggi, kesejahteraan dapat lebih meningkat. Namun anggaran 2015 tidak terserap mencapai Rp 420 triliun," kata Tjahyo. Dia mengungkapkan andai saja perencanaan yang lalu bisa lebih baik, tentu anggaran bisa digelontorkan dengan baik.

"Semoga dalam forum Musrenbang yang diawali dengan Musrenbang di beberapa wilayah ada kesepakatan, penajaman, evaluasi dan skala prioritas dalam tataran pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pertengahan tahun ini ada Musrenbangnas yang akan mengakselerasikan usulan daerah," ujar Tjahyo.

Tjahyo menekankan Kemendagri adalah poros pemerintahan, semua pemerintahan menurutnya harus tegak lurus dengan kebijakan presiden. Pemerintah Daerah tegasnya tidak boleh menyimpang dari nawacita. Tjahyo mengatakan pokok permasalahan dalam pengelolaan APBD diantaranya ketidakselerasan dokumen perencanaan dengan APBD. Belum transparan, masyarakat dan pers belum melihat dan tahapan penyusunan tidak seluruhnya dilalui. Besaran anggaran juga belum sesuai dari standar yang ada. Memecahkan paket pekerjaan, proses penyusunan perubahan apbd yang banyak tidak sesuai aturan," kata Tjahyo.

Sementara itu, Plt Gubsu mengajak Bupati dan Walikota se Sumut menyatukan tekad fikiran dan langkah untuk meningkatkan pembangunan Sumut tahun 2017. "Sekaligus yang lebih penting meningkatkan kerjasama. Saya berharap bupati/ walikota satu barisan bersama membangun Sumut," ujar Plt Gubsu dalam sambutannya.

Plt Gubsu kemudian meminta seluruh Bupati/walikota se Sumut yang hadir untuk naik ke panggung mendampingi. "Baru ini dalam Musrenbang ini bupati/walikota paling banyak hadir. Semoga ini menjadi era baru kebangkitan Sumut menjadi Sumut Paten," katanya. Kami berharap lanjut Plt Gubsu, di bidang lain Provsu mengejar ketertinggalannya bahkan bisa menjadi yang terdepan. "Dengan dukungan semua pihak pemerintahan akan terus tingkatkan pelayanan," katanya. Dalam kesempatan itu Plt Gubsu juga menegaskan agar tidak ada lagi APBD Provinsi yang digunakan tidak sesuai tupoksi sebagaimana yang terjadi pada masa lalu. Dia mencontohkan jangan ada pembangunan jalan setempat dengan menggunakan APBD Provinsi karena itu merupakan Tupoksi Pemkab/Pemko.

Menkop dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga kemudian meresmikan Pembukaan Musrenbang 2017. Dalam sambutannya Puspayoga menekankan agar Bupati/walikota segera mendelegasikan izin usaha untuk usaha mikro dan kecil ke tingkat kecamatan. Menurutny dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pemerintah fokus dengan memberi bunga ringan bagi para pelaku usaha. "Selain itu meningkatkan pelatihan SDM supaya mampu tingkatkan kualitas produk pelaku usaha kita," katanya. Dia menyebutkan pemerintah menurunkan suku bunga KUR sebelumnya 22%, sekarang menjadi 9%. "Dua hari yang lalu pemerintah launching KUR B yang berorientasi ekspor untuk UKM dan Mikro, ada dananya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia," jelasnya.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Menghadiri Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Provsu
 Hotel Grand Angkasa Medan, Jumat 1 April 2016

OBSERVASI LAPANGAN PESERTA DIKLAT IMPLEMENTASI E_ PROCUREMENT BAGI APARATUR PEMDA TAHUN 2016



Medan, Peserta Diklat Implementasi e_Procurement bagi Aparatur Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 melaksanakan Observasi Lapangan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu. Observasi Lapangan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Diklat Fungsional Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara, Eriadi SE, M.Si, Ak, CA, diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari instansi di lingkungan pemprovsu dan Kab/Kota, Jumat (01/04) di Lantai 6 Kantor Gubsu.

Yang langsung memberikan penjelasan kepada Para Peserta diklat Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika Diskominfo Provsu Dra. Eli Suhariyah, M.Si mengatakan bahwa proses e_procurement terus berjalan seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana pendukung yang ada, sehingga Diskominfo Provsu terus berupaya memberikan layanan yang terbaik. Menurut Kabid Aptel kunjungan ini memberikan apresiasi yang tinggi atas ditunjuknya Diskominfo Provsu sebagai lokasi observasi lapangan.

"Demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sesuai Renstra 2013-2018 LPSE telah dialihkan dari Biro Pembangunan Setdaprov su ke Diskominfo Provsu berdasarkan Pergub No. 38 Tahun 2015 tanggal 22 September 2015, Tentang Layanan Pengadaan secara elektronik Pemerintah Provsu." ujar Kabid Aptel

Hal ini dilakukan pemerintah guna meningkatkan kemampuan masyarakat yang memiliki ketangguhan dan keunggulan dalam memanfaatkan serta mengembangkan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup, Lanjutnya.



KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si
Mendampingi Observasi Lapangan Peserta Diklat Implementasi *e-Procurement* bagi Aparatur Pemda
Kantor Gubernur Sumut, Jumat 1 April 2016







SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Menerima Audiensi Kepala Perwakilan Redaksi Bhayangkara Utama Sumut
Ruang Kerja Sekretaris Diskominfo Provsu, Jumat 8 April 2016

PLH. KADIS KOMINFO PROVSU TERIMA AUDIENSI REDAKTUR TABLOID PURNAWIRAWAN POLRI



Medan, Pih. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Kadis Kominfo Provsu) H. M. Ayub, SE. didampingi Kepala Seksi Hubungan Lembaga dan Kemitraan Abdul Aziz, S.Sos, M.AP menerima audiensi Redaktur Tabloid Purnawirawan Polri di ruang kerja Pih. Kadis Kominfo Provsu, Jumat (8/4).

Wakil Ka. Biro Tabloid Purnawirawan Medan Wesli P. Nadapdap menyampaikan bahwa Tabloid tersebut pertama kali terbit pada pertengahan bulan Oktober tahun 2015 dengan nama Tabloid Purna Polri. Tabloid tersebut terbit 2 (dua) kali dalam sebulan pada tanggal 1 dan 15 tiap bulannya serta berisi 50% tentang Purnawirawan Polri dan Polri yang masih aktif sedangkan 50% lagi tentang pemerintahan serta masyarakat umum.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
 Menerima Audiensi Redaksi Tabloid Purnawirawan Polri
 Ruang Kerja Sekretaris Diskominfo Provsu, Jumat 8 April 2016

PLH. KADIS KOMINFO PROVSU TERIMA AUDIENSI DPD PWRI SUMUT

Medan, Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Kadis Kominfo Provsu) H. M. Ayub, SE didampingi Kepala Seksi Hubungan Lembaga dan Kemitraan Abdul Aziz, S.Sos, M.AP menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia Sumatera Utara (DPD PWRI Sumut) di ruang kerja Plh. Kadis Kominfo Provsu, Jumat (8/4).

Sekretaris DPD PWRI Sumut Ir. Rahmat Taufik menyampaikan maksud audiensi tersebut yaitu untuk bersilaturahmi terkait keberadaan DPD PWRI Sumut yang mempunyai misi untuk menyeimbangkan pemberitaan yang ada di Sumatera Utara. "Harapan kami dapat bekerja sama dengan Pemprovsu khususnya Dinas Kominfo Provsu dengan memberikan masukan perundang-undangan yang belum kami pahami karena media online bakal menjadi partner PWRI sehingga tidak ada kerancuan di dalam media yang akan disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua I DPD PWRI Sumut Wan Zulkarnain, M.Si menyampaikan bahwa keberadaan DPD PWRI di Sumut diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam rangka membangun Sumatera Utara. Saat ini media sangat diperlukan bagi masyarakat dan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Plh. Kadis Kominfo H. Ayub, SE menanggapi maksud DPD PWRI bahwa untuk peningkatan SDM dalam pemberitaan perlu adanya satu program antara lain dengan membuat bimtek atau workshop bagi wartawan. Menanggapi hal itu, Ir. Rahmat Taufik menyampaikan bahwa telah diagendakan workshop pada bulan agustus mendatang. Turut hadir Ketua OKK DPD PWRI Sumut Mabil Hamdani dan Kadip Bitmas Polresta Medan Amir Muslim.





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
 Menerima Audiensi Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI)
 Ruang Kerja Sekretaris Diskominfo Provsu, Jumat 8 April 2016

RIBUAN PENGUNJUNG SAKSIKAN PAGELARAN SENI PEMATANGSIANTAR

Medan, Ribuan pasang mata tertegun, sesekali berteriak histeris serta bersorak-sorai menyaksikan atraksi "Tarzan Siantar" memainkan beragam satwa (hewan). Mereka sekaligus mengedukasi pengunjung agar senantiasa menyayangi satwa. Dengan pakaian kebesarannya ala kulit harimau, sekelompok petugas Taman Hewan Pematangsiantar (THP) menyemarakkan Malam Pagelaran Seni dan Budaya Kota Pematangsiantar, Minggu malam (10/4) di Area Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Jalan Gatot Subroto Medan.

Pentas seni budaya yang dibuka Penjabat Walikota Siantar Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum ini dihadiri Dr. Rahmat Shah (pengelola THP), Kepala Cabang Bank Sumut Pematangsiantar, Syafrizal Syah, para Staf Ahli Walikota, Asisten Sekda, Kepala Dinas/Kepala Badan, kepala Badan beserta staf Pemko dan masyarakat Pematangsiantar yang berdomisili di Medan maupun yang sengaja datang dari kota Pematangsiantar.

Selain menyuguhkan tarian berkelompok termasuk 5 warga negara Belanda, personel THP yang dipimpin Managernya, Nandang, membawa langsung ke atas panggung aneka jenis ular, dan burung yang telah akrab dengan manusia. Hewan-hewan tersebut tampak manja dipermainkan para petugas THP. "Kayak bukan ular benaran mereka memainkan seperti itu. Tapi seru juga karena kita bisa melihatnya dari dekat," ujar sejumlah pengunjung yang asik menyimak penjelasan petugas tentang karakter ular-ular berbisa dan berbahaya tersebut.

Perhatian pengunjung juga tersedot saat tortor Sigale-gale (patung kayu berpakaian dankan kepala khas Batak setinggi dua meter) ditampilkan menari-nari di atas panggung. Tak kalah menarik perhatian pengunjung adalah penampilan grup tortor sombah, haroan bolon serta tarian gabungan 10 etnis yang menggambarkan multikulturalisme di kota Pematangsiantar oleh siswa Perguruan Sultan Agung. Selain itu, kompaknya penampilan Barongsai dan Marching Band oleh karyawan PT STTC di awal acara juga membetot perhatian pengunjung.

Pada kesempatan tersebut, Pj Walikota mengajak warga Kota Pematangsiantar, baik yang datang dari Medan untuk terus melestarikan warisan leluhur. Nilai-nilai budaya yang sangat multikultural beragam etnis di Pematangsiantar menggambarkan kota berhawa sejuk ini sangat toleran terhadap sesamanya. "Mari kita persiapkan generasi bangsa yang cerdas, berintegritas, siap menghadapi perkembangan namun juga paham budaya daerahnya sendiri," katanya.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada 10 Maret-18 April ini, Paviliun Kota Pematangsiantar yang dikelola Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata, selama sebulan juga memamerkan berbagai produk khas daerah, terutama aneka bentuk ulos yang menjadi bahan dasar pakaian. Ada juga roti Ganda, minuman khas Siantar merk Badak, kopi instan Cappucino dan lain-lain.

"Becak Siantar yang sudah semakin langka ini pun kita bawa kemari guna menarik perhatian pengunjung. Makanya setiap hari pengunjung di paviliun kita ini selalu padat," ujar Kadispora Fatimah Siregar kepada sejumlah awak media di lokasi paviliun sebelum pagelaran budaya dimulai.

Kadis menambahkan, semaraknya Malam Seni dan Budaya yang ditampilkan Pemko Pematangsiantar, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama PT STTC, PT Bank Sumut, Perguruan Sultan Agung dan Taman Hewan Pematangsiantar. "Kami atas nama Panitia mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah mensponsori kegiatan kita di PRSU ini," katanya.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menghadiri Acara Malam Pagelaran Seni & Budaya Pemko Pematangsiantar
PRSU Medan, Minggu 10 April 2016







KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si
 Menghadiri Peresmian Kantor Pemasaran Data Script Medan
 Jalan Raden Saleh Medan, Rabu 12 April 2016

DISKOMINFO PROVSU SELENGGARAKAN RAT KPRI MEDIA



Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu mengadakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (RAT-KPRI) Media Dinas Kominfo Provsu Tahun buku 2015 di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Selasa (12/4). Rapat diawali dengan pembacaan laporan oleh Ketua KPRI "Media" Dinas Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE dan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Provsu selaku pembina koperasi Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum.

RAT-KPRI Media Dinas Kominfo Provsu diadakan setiap tahun sekali sesuai Peraturan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi pasal 26 Ayat (1) dan (2) bahwa setiap koperasi yang berbadan hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang diajukan pada rapat anggota tahunan sebagai hasil pengelolaan koperasi selama tahun buku sebelumnya.

Adapun tujuan laporan pertanggungjawaban KPRI ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum hasil yang dicapai dari usaha pengelolaan koperasi selama tahun buku" ujar H. M. Ayub, SE selaku ketua KPRI. Beliau juga menjelaskan perkembangan KPRI selama ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari perolehan SHU yang diperoleh tahun 2015. SHU ini setiap tahunnya langsung dibagikan kepada anggota saat RAT berdasarkan perhitungan jasa modal dan jasa usaha secara proporsional.

Pada kesempatan ini Kadis Kominfo Provsu menyampaikan bahwa melalui Penyelenggaraan RAT KPRI seluruh jajaran pengurus diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban hasil kerjanya selama satu tahun buku kepada seluruh anggota."ini penting dilakukan untuk mengukur kinerja pengurus serta mengevaluasi seluruh program dan kegiatan agar pada masa mendatang kinerja koperasi dapat diperbaiki dan lebih disempurnakan" Ujar Kadis Kominfo.

Ketua KPRI Kota Medan Drs. H. M. Yunus Lubis mengingatkan kembali bahwa KPRI didirikan untuk membangun kesejahteraan bersama dan kebersamaan ini jugalah yang harus mengembangkan koperasi. Untuk itu Ketua KPRI Kota Medan menghimbau kepada seluruh pengurus, pengawas dan anggota untuk bersinergi bersama-sama mengembangkan koperasi. Karena anggota mempunyai 3 fungsi di dalam perkembangan koperasi yaitu 1) Anggota koperasi sebagai pemilik, 2) Anggota koperasi sebagai pemodal dan 3) anggota koperasi sebagai pengguna jasa. Beliau juga memberikan apresiasi kepada anggota KPRI karena dari segi pemodal, anggota mampu memodal kopersinya sendiri.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Membuka Rapat Akhir Tahun Koperasi Pegawai Republik Indonesia (RAT-KPRI) Media Diskominfo Provsu Tahun Buku 2015
Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Selasa 12 April 2016





PIh. KADIS KOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Penilaian Foto Bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke-68 Tahun 2016
Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Selasa 12 April 2016



DI HADAPAN KPK, PLT GUBSU DAN 15 BUPATI/WALIKOTA HASIL PILKADA TEKEN KOMITMEN BERANTAS KORUPSI

Medan, Di hadapan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dan 15 Bupati/walikota hasil Pilkada serentak beserta para Ketua DPRD menandatangani komitmen bersama untuk melakukan pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan masing-masing, Kamis (14/4) di Kantor Gubsu. Pelantikan dilaksanakan Rapat Koordinasi Penindakan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Martabe.

Hadir pada kesempatan tersebut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Penindakan KPK Heru Winarko, Dirjen Mendagri Kemendagri Tarmizi Karim Dirjen Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Agus Badarudin, Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian PAN M Yusuf Ateh, pimpinan BPKP Dadang Kurnia, auditor utama keuangan V BPKP Bambang, Dirjen Panalogi Kehutanan dan Lingkungan Sestama LKPP, FKPD Provsu, Sekdaprovu H Hasban Ritonga Kepala BPK Perwakilan Sumut, 15 bupati walikota se Sumatera Utara, Ketua DPRD 15 Kabupaten Kota se-Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. Menurut Plt Gubsu, Sumut bersyukur karena KPK ikut melakukan pendampingan terhadap tata kelola pemerintah daerah guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara. "Diharapkan dengan penandatanganan komitmen bersama dihadapan pimpinan KPK hari ini, agar pimpinan daerah baik provinsi dan Kabupaten Kota memiliki komitmen menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik yang baik dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku," sebut Plt Gubsu.

Plt Gubsu juga mengapresiasi langkah yang dilakukan KPK pada acara Rapat Koordinasi Penindakan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Sumatera Utara sebagai fasilitator dalam mendorong seluruh jajaran pemerintahan di Sumatera Utara untuk semakin gigih dalam pencegahan dan penegakan hukum di Sumatera Utara. "Rapat Koordinasi ini sangat bermanfaat untuk pencegahan dan pedoman pengelolaan keuangan negara, peningkatan pelayanan publik," kata Plt Gubsu. Menurut Plt Gubsu korupsi adalah isu korupsi yang sangat sensitif di mata masyarakat sehingga menjadi sorotan. Karena praktek korupsi kerap dilakukan dengan jabatan di pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif.

Dikatakan Plt.Gubsu upaya terbaik pemberantasan korupsi adalah melakukan pencegahan sejak dini. Pemberantasan KKN lanjut Plt Gubsu merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah di Provinsi Sumatera Utara. Disampaikannya ada 4 hal yang perlu dilakukan secara bersama diantaranya penguatan visi dan pemahaman terhadap semangat anti korupsi, mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan, meningkatkan upaya penindakan dan mendorong peran masyarakat sipil dalam memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah di Sumatera Utara. "Diharapkan dengan 4 hal ini semangat anti korupsi menjadi sebuah budaya yang membumi di Sumatera Utara," ujar Plt Gubsu.

Sementara menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kegiatan ini diselenggarakan karena sejumlah latar belakang. Diantaranya, karenan berulangnya kasus korupsi yang terjadi di provinsi Sumatera Utara, yang melibatkan eksekutif, legislatif dan swasta. KPK lanjutnya juga menyadari rendahnya kesadaran para penyelenggara negara di Sumatera Utara untuk melaporkan hartanya. "Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya. Baru sebanyak 6,25 persen ditingkat eksekutif, dan 2,04 persen di tingkat legislatif," katanya. KPK juga mengamati masih kuatnya intervensi yang terjadi, dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta akses bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Karena itu, Alex menghimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen anti korupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel. Selain mengimbau KPK juga menyampaikan rekomendasi. Selanjutnya, KPK akan terus mendorong Pemprov Sumut untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi. KPK juga berharap masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan dengan efektif, dan tidak permisif pada tindak pidana korupsi sekecil apapun.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut, Kamis 14 April 2016



PARIPURNA ISTIMEWA HUT SUMUT KE 68: PLT GUBERNUR SUMUT AJAK 33 KABUPATEN DAN KOTA BERSINERGI BANGUN SUMUT

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengajak masyarakat menjadikan Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Sumut sebagai momentum introspeksi dalam upaya peningkatan pembangunan di masa mendatang. Ajakan tersebut dikemukakan Plt Gubsu saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sumut dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumut ke 68 di gedung rapat Paripurna DPRD Sumut, Jl Imam Bonjol Medan, Jumat (15/4/2016).

Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD Sumut, anggota DPR RI dan anggota DPD-RI Dapem Sumut, unsur FKPD Sumut, Konsul Jenderal (Konjen) negara sahabat, para mantan gubernur dan mantan ketua DPRD Sumut, Sekda Sumut, para asisten, staf ahli, Kepala Dinas (Kadis), Kepala Badan dan Kepala Biro, kepala Kantor danseluruh instansi di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumut, Plt Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Evi Diana Erry, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Wilayah IX Sumut-Aceh, Bupati, Walikota di Sumut, Ketua DPRD Kabupaten/ Kota seSumut, rektor dan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu mengatakan, mengenang masa lalu memang perlu. Namun yang tidak kalah penting bagaimana kita mampu mengaktualisasikan nilai-nilai positif warisan masa lalu tersebut ke dalam aksi nyata untuk membangun Sumut kedepan," ujar Plt Gubsu. Menginjak usia ke 68 tahun, kondisi kesejahteraan masyarakat Sumut semakin membaik ditinjau dari beberapa indikator pembangunan. Berdasarkan kondisi perekonomian makro tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Sumut telah baik mencapai 5,10 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,79 persen. "Pencapaian ini harus kita tingkatkan terus demi mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat Sumut. Kini tidak saatnya berpangku tangan. Kerja, berprestasi dan kerja. Sumut kini jauh tertinggal dari sejumlah daerah lain," harap Plt Gubsu.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu mengajak seluruh pengambil kebijakan di 33 Kabupaten/Kota untuk terus bersinergi dalam mendorong pembangunan di Sumut. "Sumut tidak membutuhkan Superman. Kita membutuhkan Super Team yang saling bersinergi satu sama lainnya. Kebersamaan adalah kekuatan. Saatnya Sumut menjadi provinsi yang jauh lebih paten dari provinsi lain. Apalagi Sumut merupakan provinsi terbesar ke 4 di Indonesia," ajak Plt Gubsu.

Tidak lupa Plt Gubsu menyampaikan rasa terima kasih kepada pemimpin Sumut terdahulu yang telah mengadakan diri dan dedikasinya, baik di jajaran Pemrov Sumut maupun di Kabupaten/Kota. "Jasa para pemimpin kita terdahulu sangat besar untuk Sumatera Utara. Baik bagi yang masih hidup saat ini maupun yang telah mendahului kita," ujar Plt Gubsu.

Pelaksana Ketua DPRD Sumut, Parlinsyah Harahap SE mengatakan, perkembangan Sumut dari masa ke masa mengalami ragam dinamika, akibat perkembangan ditingkat regional, nasional dan dunia. "Juga tidak terlepas dari perubahan sosial dan politik di kawasan Asia Tenggara yang mempengaruhi Sumatera Utara, termasuk terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean yang telah diberlakukan saat ini," ujar Parlinsyah. Parlinsyah menegaskan, untuk memenangkan persaingan di era MEA, Sumut harus melakukan percepatan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing dalam dunia kerja.

Sebelum menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Sumut ke 68, Plt Gubsu, Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Muspida Plus melakukan ziarah, doa bersama dan tabur bunga di makam mantan pejabat Sumut di Taman Makam Pahlawan Jl Sisingamangaraja Medan dan makam mantan Gubernur Sumut H Tengku Rizal Nurdin di Kompleks Perkuburan Masjid Raya Al Mashun Medan.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA H. M. AYUB, SE

Menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Pemprovsu ke-68
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provsu, Jumat 15 April 2016

DISKOMINFO PROVSU SELENGGARAKAN RAPAT KARYA TULIS DAN FOTO PERS TAHUN 2016

Medan, Kepala Dinas Kominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik SH, M. Hum diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE Membuka Rapat Karya Tulis Pers dan Foto Pers Tahun 2016 bersama Dewan Juri bertempat di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu Jumat (15/4)



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Membuka Rapat Rekapitulasi Penilaian Lomba Karya Tulis dalam rangka HUT Pemprovsu ke-68
Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Jumat 15 April 2016







SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Menjadi Pembina Upacara Bendera 17-an
Halaman Kantor Diskominfo Provsu, Senin 18 April 2016



Medan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hun yang diwakili Kepala Bidang SKDI H. Afni, SE menghadiri Technical Meeting Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tahun 2016 dan Lomba Pementasan Media Tradisional Kab/Kota se Sumatera Utara tahun 2016 di aula Transparansi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Selasa (19/4).

KABID SKDI DISKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE

Rapat *Technical Meeting* Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten dan Kota Tahun 2016
Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Selasa 19 april 2016



DELI SERDANG JUARA LOMBA MEDIA TRADISIONAL SUMUT 2016

Medan, Grup Deli Company Kabupaten Deliserdang berhasil keluar selaku Juara Pertama Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten dan Kota tingkat Provinsi Sumut 2016 yang digelar Dinas Kominfo Sumut, Rabu (20/4) di Auditorium RRI Medan. Pada perlombaan yang dibuka Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si diwakili Assisten Administrasi Umum H. Fitriyus, Deliserdang juara pertama setelah melalui penilaian yang cukup ketat oleh Dewan Juri diketuai DR. Ir. Hj. Hidayati, M.Si yang Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut dan juga Ketua Forum Komunikasi Media Tradisional Sumut.

Sedangkan Grup Belalang Kadong dari Kota Medan dan Grup Humbang Nauli dari Kabupaten Humbahas menduduki Juara II dan III serta Juara Harapan I, II dan III masing-masing Sanggar Sari Jolo New dari Kabupaten Samosis, O2N dari Tebing Tinggi dan Jentera Malay dari Kabupaten Langkat. Plt Kadis Kominfo Sumut H. M. Ayub menyerahkan trofi dan hadiah kepada para pemenang dan berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan hingga ke tingkat nasional. Kabid SKDI Sumut Hj Afini SE menyampaikan apresiasi bahwa lomba yang berlangsung meriah ini diwarnai kompetisi cukup ketat oleh masing-masing kabupaten dan kota se-Sumut namun suasananya penuh persahabatan dan sportivitas.

Sebelumnya Plt Gubsu melalui Assisten Admum H Fitriyus saat membuka lomba mengemukakan kegiatan ini memiliki makna penting sebagai wujud perhatian pemerintah provinsi dalam pembinaan dan pemberdayaan media tradisional dalam pembangunan daerah. "Saat ini dan di masa-masa mendatang, kita akan terus dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan penyampaian informasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Korelasinya dengan tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan akses informasi kepada masyarakat lanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik dan khusus Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik secara tegas mengamanatkan kepada seluruh badan publik untuk mewujudkan kebebasan dalam akses informasi kepada seluruh warga negara. "Oleh karenanya, seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan perlu membangun sinergitas yang konstruktif dalam mengembangkan pola atau sistem yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar," ujarnya.

Meskipun secara faktual dengan memperhatikan kondisi Sumatera Utara hal itu tidaklah mudah untuk diwujudkan mengingat secara tofografi Sumatera Utara terbagi atas tiga kawasan yaitu kawasan dataran tinggi, kawasan pantai barat dan kawasan pantai timur, dimana akses informasi terutama melalui media elektronik maupun cetak cukup sulit untuk dapat dinikmati seluruh warga Sumatera Utara, khususnya yang berada di pelosok pedesaan, namun upaya harus terus dilakukan secara sungguh-sungguh," ujarnya.

Memperhatikan kondisi Sumatera Utara, termasuk aspek sosio-kulturalnya, tentunya pemerintah provinsi memandang penting keterlibatan media tradisional yang dapat dimanfaatkan perannya sebagai media penyebar informasi pembangunan.

Mengingat akar sosiologisnya, tentu media tradisional akan lebih dapat memberikan daya tarik tersendiri dalam penyebaran informasi. Disamping untuk menjaga eksistensi budaya lokal di tengah perkembangan seni budaya kontemporer juga dapat mengisi kekosongan spot hiburan yang dilakukan media nasional, serta merangsang partisipasi melalui penyebaran informasi dan inovasi, ujarnya. Lomba yang memanfaatkan potensi kearifan lokal ini sangat relevan dengan visi Pemprovsumu yaitu "Menjadi Provinsi yang Berdayasaing Menuju Sumatera Utara Sejahtera".

Hal ini merupakan ide kreatif sebagai ajang yang sangat ampuh memanfaatkan media tradisional untuk menyampaikan atau mempublikasikan visi maupun pesan-pesan program pembangunan yang dimiliki pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui pementasan media tradisional seperti pada kegiatan hari ini. Saya yakin, dengan adanya kegiatan seperti ini seluruh masyarakat akan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan Sumatera Utara, ujarnya.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK SH, M.HUM

Menghadiri Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara 2016
Auditorium RRI Medan, Rabu 20 April 2016





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Menutup Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2016
Auditorium RRI Medan, Rabu 20 April 2016



SEKDA PROVSU BUKA SOSIALISASI DAN EDUKASI KEUANGAN

*Harap Bank Daerah Fokus Gaet Pensiunan

Medan, Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH mengharapkan ke depannya bank pembangunan daerah, PT Bank Sumut bisa lebih fokus menggaet nasabah para pensiunan PNS. Menurutnya para pensiunan PNS ini perlu didorong untuk tetap berkarya melalui kegiatan wirausaha sehingga ikut memajukan perekonomian daerah.

Hal itu dikatakan Sekda Provsu saat membuka acara Sosialisasi & Edukasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Kantor PT Bank Sumut, Kamis (1/4). Hadir H Hasban Direktur Pemasaran PT Bank Sumut Ester Junita Ginting, ekonom Benjamin Gunawan dan kepala SKPD di lingkungan Pemprovsu.

Sekda Provsu mengatakan jumlah PNS di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjumlah sekitar 12.000 an dimana setiap tahunnya ada 400 hingga 470 an PNS yang masuk usia pensiun. Jumlah itu belum termasuk PNS di lingkungan 33 pemerintah kabupaten/kota serta instansi vertikal di Sumatera Utara. "Kalau PNS seluruh daerah, ditambah instansi dinas lintas vertikal jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu. Ini potensi, pangsa besar bagi Bank Sumut yang bisa dibidik. Kalau mereka sejahtera, ada multiplier effect, perekonomian Sumut akan ikut bergerak," ujar Sekda.

Dijelaskan Sekda Provsu, pihaknya melaksanakan program pendampingan bagi para PNS dalam mempersiapkan masa pensiun melalui berbagai pelatihan. "Tujuannya agar mereka tidak merasa post power syndrome, tetap optimis dan semangat untuk berkarya," kata Sekda Provsu.

Dia mengatakan, secara moral ada tanggungjawab bagi para PNS membesarkan Bank Sumut. Disamping itu, Sekda Provsu mengatakan juga agar Bank Sumut perlu terus berbenah menghadapi era persaingan bebas. "Perlu terus berbenah, dalam hal pelayanan agar menjadi cepat, tepat dan murah. Ramah tamah perlu terus dipelihara, kebijakan Bank terkait bunga dan agunan menjadi pertimbangan minat PNS atau masyarakat umum. Harapan kalau bank Sumut mampu bersaing, daerah akan mendapatkan manfaat. Tolong kepala SKPD sosialisasikan kepada seluruh jajaran," imbuh Sekda Provsu.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Bank Sumut Ester Junita Ginting mengakui kredit pensiun PNS masih belum banyak di PT Bank Sumut. "Fenomenanya, selama PNS masih aktif mereka mengambil kredit di Bank Sumut, namun ketika masuk pensiun justru mengambil kredit dari bank lain," kata Ester.

Hal tersebut menurutnya dikarenakan masih banyak PNS yang belum mengetahui ada kredit bagi pensiun di Bank Sumut. "Padahal sudah ada dan bisa disalurkan satu tahun sebelum pensiun, dengan suku bunga yang bersaing dengan bank lain dan bisa untuk jangka waktu hingga sepuluh tahun," ujar Ester.

Dikatakan Ester, Bank Sumut adalah milik Sumut, dan kami berharap juga menjadi kebanggaan Sumut. PT Bank Sumut menduduki ranking lima besar dari 26 bank pembangunan daerah se Indonesia jika dilihat dari jumlah total asset. Per Desember 2015 memiliki asset senilai Rp 24 triliun, dimana 52% saham dimiliki Pemprovsu, dan pihak ketiga yang terkumpul mencapai Rp 19,5 triliun, dimana 10% diantaranya adalah bersumber dari pengelolaan dana PNS di Sumut.

Bank Sumut dijelaskan Ester menyalurkan kredit hampir Rp 19 triliun, dimana diantaranya Rp 12 triliun adalah kredit retail yang mayoritas adalah kredit PNS. "Kredit PNS tidak ada yang macet. Kami tentunya sangat berterimakasih kepada para PNS," ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri jajaran SKPD Pemerintah Provsu, Ester menjelaskan bahwa Bank Sumut juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemprov maupun pemerintah 33 kabupaten/kota. Dari total saham yang ditempatkan masing-masing mendapatkan dividen dengan rasio berkisar 40%. "Bagaimana dapat menghasilkan return yang tinggi, itu karena seluruh PNS menabung dan kredit di Bank Sumut," ujarnya.

Sebagian keuntungan juga disalurkan melalui CSR, bekerjasama dengan pemerintah. "Kami berkomitmen menjadi Bank Sumut sebagai bank utama untuk pelayanan publik, siap untuk merealisasikan sistem CMS Kasda di seluruh Pemkab/Pemko dan Pemprov, serta melayani pembayaran listrik dan air," jelas Ester.

Dalam pertemuan, pembicara Gunawan Benjamin membawakan materi bagaimana mengatur keuangan pribadi dan keluarga. Gunawan membagi tips agar menerapkan hidup sederhana yaitu hidup sesuai kebutuhan saja. "Belanja harus lebih kecil dari pendapatan, jangan pernah berbelanja melebihi pendapatan, dan anda akan jauh lebih bahagia," ujarnya. Dia juga mengatakan untuk menghindari hutang, kecuali untuk hal-hal yang produktif.



KEPALA SUBBAG KEUANGAN JULITA, SE
Menghadiri Sosialisasi dan Edukasi Keuangan di Lingkungan Sekda Provsu
Aula Kantor Bank Sumut, Kamis 21 April 2016

**PEMROV SUMUT-TELKOM TANDATANGANI MOU PROGRAM SMART PROVINCE:
PLT GUBERNUR SUMUT HARAPKAN SUMUT JADI PROVINSI CERDAS TEKNOLOGI INFORMASI**

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mendorong jajaran SKPD terlatih dalam mengelola data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi. Harapan itu dikemukakan Plt Gubsu dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) TBK Divisi Regional I Sumatera dalam pembangunan Smart Province dilingkungan Pemrov Sumut yang berlangsung di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Kamis (21/04/2016).

Hadir dalam acara tersebut Executive Vice President PT Telkom Regional 1 Sumatera Tengku Muda Nanta, GM PT Telkom Medan Zahran Nasution, Sekdaprov Sumut Hasban Ritonga, para Asisten, Staf Ahli dan para Kepala SKPD Jajaran Pemprovsu, Sekda Kabupaten/Kota di Sumut.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu mengatakan, Program Smart Province merupakan langkah maju Pemrov Sumut dalam tata kelola data dan informasi dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Saya berharap, seluruh SKPD jajaran Pemerintah Provinsi untuk mendukung program ini dengan menyediakan database sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing SKPD guna memudahkan dalam melayani masyarakat," harap Plt Gubsu.

Jajaran SKPD Pemrov Sumut juga diharapkan memegang komitmen kuat dalam upaya mewujudkan Sumatera Utara menjadi Smart Province. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah merangkul kerjasama dengan pihak Telkom sebagai pihak berpengalaman dibidang telekomunikasi. "Kerjasama diharapkan akan membawa Sumatera Utara lebih maju seiring program-program lain yang akan dilakukan ke depannya," tambah Plt Gubsu.

Tidak lupa Plt Gubsu mengimbau 33 Kabupaten/Kota di Sumut untuk mendukung program kerjasama dengan Telkom. Selanjutnya, kerjasama tersebut akan diikuti seluruh kabupaten/kota demi menjadikan Sumut menjadi Smartcity. "Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, konektivitas dengan daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara dapat dijangkau dengan baik masyarakat dengan mudah dapat memperoleh informasi yang transparan," harap Plt Gubsu.

Sementara Executive Vice President PT Telkom Regional 1 Sumatera, Tengku Muda Nanta mengatakan, kerjasama yang ditandatangani ini merupakan perwujudan satu dari 9 Nawacita Presiden RI Jokowi-dodo yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, birokratif dan terpercaya. "Tentunya yang menguasai teknologi informasi dan telekomunikasi dialah yang akan memenangkan persaingan," sebut Nanta.

Nanta juga menyampaikan apresiasi kepada Pemrov Sumut yang telah bersedia menjalin kerjasama dalam penerapan Program Smart Province. "Sumutlah yang pertama untuk Implementasi Smart Province. Semoga program ini memberikan banyak manfaat positif. Paling tidak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik," harap Nanta.

PT Telkom juga berharap dapat menjalin MoU yang sama dengan 33 Kabupaten/Kota di Sumut di masa mendatang. "Dengan demikian, Implementasi Smart Province dan Smart City bisa berjalan dengan sukses," sebut Nanta.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Menghadiri Acara Penandatanganan MoU Program *Smart Province*
Aula Kenanga Kantor Gubsu, Kamis 21 April 2016



WASPADAI INFLASI TINGGI, TPID SE SUMUT BAHAS INSTRUMEN KENDALIKAN HARGA

* Jelang Puasa/Lebaran Plt Gubsu Minta TPID Kab/kota Fokus Kendalikan Harga

Parapat, Plt. Gubsu Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/kota se Sumatera Utara untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengendalikan harga di wilayah masing-masing. Plt. Gubsu menginstruksikan TPID kabupaten/kota bisa menerapkan langkah-langkah antisipasi diantaranya menjamin ketersediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, memastikan pasokan melalui monitoring ke sentra produksi dan intervensi pasar. Hal itu diungkapkan dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH pada saat membuka Rapat Koordinasi TPID Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Utara di Hotel Niagara Parapat pada Jumat (22/4).

Hadir dalam acara yang difasilitasi Bank Indonesia itu Pimpinan Bank Indonesia Sumatera Utara Medan Difi A. Johansyah, Kepala Bidang Moneter Kemenko Perekonomian Puji Gunawan, Kepala Divre Bulog se Sumut Fatah Yasin, pimpinan Kantor Perwakilan BI Medan, Sibolga dan Kota Pematang Siantar dan TPID kabupaten/kota se Sumatera Utara.

Rakor TPID digelar dalam upaya menghadapi potensi ancaman inflasi seperti yang terjadi pada bulan Maret 2016 yang lalu yakni secara bulanan (month to month) sebesar 0,84%, sementara inflasi nasional sebesar 0,19 persen. Dijelaskan, peningkatan tekanan inflasi terjadi di seluruh kota sampel perhitungan indeks harga konsumen (IHK) di Sumut yaitu Kota Medan inflasi sebesar 0,83%, Pematangsiantar 0,66%, Padang Sidempuan inflasi sebesar 0,54% dan Kota Sibolga 0,75%. "Jika dilihat inflasi secara triwulan, Inflasi Sumut pada triwulan I tercatat sebesar 2,00 %, sementara inflasi nasional 0,62 % sehingga inflasi Sumut pada triwulan I diatas inflasi nasional 1,38%," kata Plt. Gubsu.

Bahkan menurut Kepala BI Difi Djohansyah, Sumut menduduki posisi tertinggi angka inflasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Faktor penyebab tingginya inflasi pada bulan Maret 2016 ini adalah naiknya harga komoditas seperti harga cabe merah naik 39,11%, harga bawang merah naik 29,18%, harga mobil naik sebesar 5,44%, harga rokok putih naik 9,47% dan lain-lain.

"Perlu melakukan kunjungan ke sentra produksi pertanian, peternakan, gudang-gudang, distributor dan pasar-pasar untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat," imbuh Plt Gubsu. Dikatakannya, mengingat tingginya angka inflasi Sumut pada triwulan pertama tahun 2016 ini, maka perlu antisipasi terjadinya inflasi akibat kenaikan harga kebutuhan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. "Saya mengharapkan tim pengendalian inflasi seluruh kabupaten/kota melakukan rapat TPID dengan mengundang para distributor, instansi terkait di wilayah asing-masing," ujarnya.

Selain itu perlu menjamin ketersediaan informasi harga pangan bagi semua pelaku ekonomi, baik produsen (petani), pedagang dan konsumen dan melaporkan perkembangan harga di daerah melalui PIHPS "Siharapanku".

Sementara itu, Difi menambahkan tekanan inflasi volatile foods pada Bulan Maret 2016 yang lalu mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan untuk komoditi cabe merah dan bawang merah. Hal ini tidak sejalan dengan keadaan Sumatera Utara yang merupakan sentra komoditi cabe merah seperti kabupaten Batubara, Karo, Simalungun dan lain-lain. Padahal Sumut tercatat sebagai produsen cabe merah nasional terbesar ke dua dengan kontribusi memenuhi 18% kebutuhan cabe nasional.

Adapun penyebab tingginya harga komoditi cabe merah di Sumut pada bulan Maret 2016 adalah menurunnya pasokan cabe di pasar-pasar di Sumut sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan harga, sementara itu cabe merah dan sentra produksi kabupaten Batubara dipasarkan di luar Provinsi Sumut seperti Pekanbaru, Batam, Padang dan lain-lain. "Untuk itu perlu dicari solusi, menentukan instrument yang tepat secara bersama untuk menjaga inflasi menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," ujarnya.

Difi mengatakan bila Sumut tidak mewaspadai gejala ini, dikhawatirkan bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi maka sasaran angka inflasi Sumut sebesar 4 ± 1 % tidak akan tercapai. Berdasarkan pengamatan BI, menurutnya ada perubahan pola pergerakan inflasi yang tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. "Awal Januari hingga April adalah periode panen raya beras dan cabe merah, sehingga umumnya di Sumut pada periode itu justru terjadi deflasi. Namun pola yang terjadi selama tiga tahun sebelumnya itu tidak terjadi lagi, malah tahun ini Sumut alami inflasi," ujarnya. Dengan demikian Bonus deflasi tidak terjadi, sehingga dikhawatirkan secara akumulasi angka inflasi Sumut pada akhir tahun 2016 nanti tinggi dan sasaran tidak tercapai.

Berbagai instrument yang bisa dilakukan secara bersama adalah mempercepat implementasi toko tani yang di Sumut rencananya 60 unit, membangun pasar lelang komoditas sebagai sarana bagi pedagang dan petani berinteraksi secara wajar serta mengaktifkan fitur early warning system pada PIHPS Sumut sebagai alat monitoring harga di 33 TPID kabupaten/kota se Sumut.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Menghadiri Rapat Koordinasi TPID Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
 Hotel Niagara Parapat, Jumat 22 April 2016

JURNALIS DAN DISKOMINFO SUMUT GELAR OUTBOUND



Pancurbatu, Sejumlah jurnalis unit Kantor Gubernur Sumatera Utara mengikuti outbound di Kampung Ladang Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deliserdang, Sabtu (23/4). Kegiatan sehari penuh itu juga diikuti para PNS dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Sumut.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Dinas Kominfo Sumut Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum didampingi Kabid Pendapat Umum Hubungan Kelembagaan Hj Rosmidar dan Kepala Seksi Hubungan Lembaga dan Kemitraan Abdul Aziz Batubara memberi apresiasi atas penyelenggaraannya kegiatan ini.

"Intinya, kegiatan yang diadakan setiap tahun ini, ditujukan untuk membangun soliditas kerja sama antara insan pers dengan Pemprov Sumut, terutama Dinas Kominfo Sumut," ujarnya.

Karenanya, lanjut Jumsadi yang juga Pj Walikota Pematangsiantar ini, tema outbound kali ini dengan 'Outbound Jurnalis dalam Rangka Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis untuk Mendukung Good Government'. "Tema ini sangat relevan dewasa ini," ujar Jumsadi.

Mengacu pada tema acara, lanjut Jumsadi, jelaslah bahwa pengharapan yang ingin digalang pihaknya adalah meningkatkan kebersamaan antara wartawan dengan Pemprov Sumut. "Kegiatan ini sangat positif, karena kita dilatih untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Bahkan kita akan dibentuk menjadi pribadi yang profesional berkinerja prima," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Jumsadi merasakan bahwa setiap peserta baik itu secara sadar ataupun tidak, telah dituntut untuk menjalin kerjasama dengan peserta lainnya dalam menyelesaikan masalah.

"Sejatinya, melalui outbound kita disadarkan bahwa pekerjaan akan semakin cepat selesai jika dikerjakan bersama. Kegiatan ini menjadi jembatan di antara kita untuk lebih mempererat silaturahmi," ucapnya.

Kegiatan yang ditutup Kabid Pendapat Umum Hubungan Kelembagaan Hj Rosmidar didampingi Kepala Seksi Hubungan Lembaga dan Kemitraan Abdul Aziz Batubara ini guna melatih kemampuan terutama menumbuhkan jiwa leadership yang mungkin selama ini tidak nampak.

Beberapa metode outbound training menggunakan permainan atau kegiatan yang telah diatur sebelumnya untuk membawa suatu tim ke dalam suatu permasalahan. Saat tim tersebut berjuang mengatasi masalah yang ada, maka jiwa leadership seseorang akan muncul. Melatih kerjasama tim.

Kegiatan outbound training dalam bentuk permainan yang melatih masing-masing individu yang mungkin terbiasa bekerja sendiri untuk dapat berkolaborasi bersama timnya di dalam menyelesaikan permainan. Keseimbangan antara pola berpikir realistis, konseptual dan feeling seseorang adalah senjata yang sangat ampuh di dalam mengambil keputusan.



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Membuka Kegiatan *Outbound* Jurnalis Unit Kantor Gubernur Sumatera Utara
Kampung Ladang *Outbound* & *Water Ball* Kab. Deli Serdang, Sabtu 23 April 2016



8.519 WAKAF DI SUMUT BELUM BERSERTIFIKAT PLT GUBSU HIMBAU NAZHIR WAKAF URUS SERTIFIKASI

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menghimbau para nazhir wakaf di Sumut segera mengurus sertifikasi aset wakaf yang belum bersertifikat. Tercatat jumlah nazhir wakaf di Sumut mencapai 16.280 orang yang mengelola aset tanah/bangunan wakaf, namun hanya 7.761 wakaf sudah bersertifikat dan sebanyak 8.519 belum memiliki sertifikat. Tujuannya agar aset wakaf dapat bersifat produktif dan bermanfaat bagi sebanyak mungkin bagi umat serta tetap terjaga keutuhannya.

Hal itu disampaikan Plt Gubsu saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Himpunan Nazhir Wakaf Indonesia Sumut H. Taufiqurrahman, MAP, Sekretaris Drs. H. Letu Brutu dan Bendahara DR. H. Wagirin, SH di ruang kerja Jln Diponegoro Medan, Senin (25/4). Plt Gubsu didampingi Plt Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Asren Nasution dan Kabag Agama Biro Kemasyarakatan dan Bina Sosial Sudarto Purba.

Dia mengharapkan Himpunan Nazhir Wakaf Sumatera Utara ikut mendorong pemanfaatan wakaf di Sumut agar lebih produktif dan bermanfaat bagi umat. Plt Gubsu mengatakan bahwa tujuan esensial dari wakaf adalah agar aset yang diwakafkan dapat bersifat produktif dan dapat diambil manfaatnya sebanyak mungkin oleh banyak orang, dengan tetap menjaga keutuhan barangnya. "Oleh karenanya sertifikasi seluruh wakaf di Sumut perlu terus dikejar agar wakaf tetap utuh dan bermanfaat," katanya.

Dikatakan Plt Gubsu posisi Himpunan Nazhir Wakaf Indonesia sangat strategis dalam upaya menggerakkan dan mendorong pemanfaatan wakaf di Sumut agar bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi kesejahteraan umat. "Wakaf idealnya menjadi aset produktif yang sangat bermanfaat bagi pembangunan umat. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang profesional atas benda wakaf dan manfaatnya tetap utuh dan terpelihara, sehingga secara terus menerus dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat wakaf," kata Plt Gubsu.

Untuk itu, Plt Gubsu menyambut baik program kegiatan yang akan dilaksanakan Himpunan Nazhir Wakaf Indonesia Sumut untuk meningkatkan kualitas SDM nazhir di Sumut. "Pemerintah Provinsi akan ikut membantu upaya peningkatan kualitas SDM para nazhir di Sumut," ujar Plt Gubsu.

Sebagaimana dilaporkan Taufiqurrahman, sebanyak 16.280 orang nazhir wakaf yang jumlahnya inklusif dengan harta wakaf berupa mesjid, perkuburan, madrasah dan lainnya. Dari jumlah wakaf 16.280 dikelola nazhir tersebut, sebanyak 7.761 persil sudah memiliki sertifikat dan sisanya, 8.519 persil belum bersertifikat.

Menurut dia, salah satu penyebab banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat disebabkan ketidaktahuan para nazhir. "Padahal Kementerian Agama sudah menyediakan anggaran pengurusan sertifikat untuk tanah wakaf, namun meski demikian masih banyak nazhir yang belum menguruskannya. Dia menilai persoalan masih banyaknya wakaf yang belum bersertifikat disebabkan persoalan kemampuan SDM para nazhir.

Untuk itu, pihaknya berupaya melakukan sosialisasi maupun upaya peningkatan wawasan dan kemampuan para nazhir di Sumut. "Kami ingin mewadahi para Nazir wakaf yang profesional, dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia Nazir wakaf di Sumatera Utara," katanya.

Wagirin menambahkan, permasalahan utama pengelolaan wakaf di Sumut adalah masih banyak nazhir yang belum memahami tugas dan fungsinya, minimnya dana operasional organisasi dan adanya keinginan pewakaf menarik kembali asetnya karena nilai sosial ekonomi yang meningkat. "Oleh karenanya kami ingin agar para Nazhir wakaf berkualitas dan kuat," katanya.



KABID PUHK DISKOMINFO PROVSU Hj. ROSMIDAR, S.Ag, M.Pd
 Menghadiri Audiensi Himpunan Nazir Wakaf Indonesia (HNWI) Sumatera Utara
 Ruang Kerja Plt. Gubsu, Senin 25 April 2016

KABID SKDI DISKKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE

Menghadiri Pembukaan Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Sumatra Utara Tahun 2016

Auditorium RRI Medan, Rabu 27 April 2016



PLT GUBSU AKUI KIM STRATEGIS DALAM PENYEBARAN INFORMASI

Medan, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam upaya penyerapan dan penyebaran informasi. Untuk itu pemberdayaan KIM kian penting menuju peradaban masyarakat informasi.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengemukakan itu dalam sambutan dibacakan Staf Ahli Gubsu Robertson pada Lomba KIM se Sumut tahun 2016 di Aula RRI Sumut di Medan, Rabu (27/4).

Kadis Kominfo Sumut Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum diwakili Kabid SKDI Hj. Afni, SE selaku penyelenggara sebelumnya melaporkan kegiatan ini untuk membina dan memberdayakan kelompok informasi yang ada di Sumut sehingga menjadi wadah untuk mencerdaskan masyarakat sekaligus menyelaraskan program pemerintah dalam pembangunan.

Berhasil menjadi Juara I pada lomba kali ini yakni KIM Bertuah Serdangbedagai dengan hadiah Rp 7,5 juta, Juara II KIM Deli Company Deliserdang hadiah Rp 6 juta, Juara III KIM Martabe Humbahas hadiah Rp 5 juta, Juara Harapan I KIM Nelayan Bahari Ttanjungbalai hadiah Rp 4 juta, Harapan II KIM Santika Labuhanbatu hadiah Rp 3 juta dan Harapan III KIM WIMSITT Tapanuli Tengah hadiah Rp 2 juta.

Lebih lanjut Plt Gubsu memaparkan pemberdayaan KIM perlu ditingkatkan diantaranya melakukan pelatihan dan pendidikan SDM, mengikutsertakan KIM dalam kegiatan pemerintah, mengembangkan jaringan antar KIM dan lainnya.

Lebih lanjut Plt Gubsu mengisyaratkan era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi (IK) menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah.

Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam memilah dan memilah informasi yang tersedia secara transparan berdampak pada kontra produktif dan menghambat pembangunan di segala bidang.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) paparnya memiliki peran strategis dalam upaya menjawab tantangan tersebut karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia merupakan masyarakat sadar informasi yang diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top down) atau antara masyarakat dan pemerintah (bottom up).

KIM sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif yang bermanfaat untuk menopang aktivitas mereka.

Selain sebagai agen informasi, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi pondasi memperkuat ekonomi masyarakat. Keberadaan KIM membangun karakter masyarakat peduli, peka dan menguasai informasi. Sebab KIM sebagai penyedia informasi yang dapat bertukar informasi di antara kelompok.

Dikemukakan semakin maju teknologi membuat semakin cepat masyarakat mendapatkan informasi. Saat ini masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, namun semua itu harus didukung dengan penguasaan teknologi informasi. Sebab kalau ingin maju dan sejajar dengan negara lain, harus diupaya mendorong keterbukaan informasi. "Kita jangan jadi orang tertinggal. Bidang Komunikasi dan Informatika, ingin membuat masyarakat menguasai teknologi informasi," jelasnya.

Masyarakat tidak menggunakan teknologi disebabkan informasi mengenai teknologi tersebut tidak sampai. Ia menambahkan, peran penyampaian informasi itu dapat dilakukan KIM seperti, kelompok pengajian, kelompok nelayan dan kelompok lain di masyarakat. Karena lancarnya penerimaan suatu informasi berdampak terhadap penambahan ilmu pengetahuan.

"Jadi jika ingin mendapatkan informasi, bentuklah KIM. Sebab KIM tersebut dari rakyat dan untuk rakyat. Apalagi untuk mendapatkan informasi telah dilindungi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," paparnya.

Menurutnya, saat ini informasi menjadi barang paling berharga, dan menjadi alat meningkatkan kualitas hidup. Untuk memperoleh dan mengelola informasi tersebut dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

KIM berperan sebagai pembendung dan penyaring informasi bagi masyarakat selain menjadi mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi, menyalurkan aspirasi masyarakat, pembangunan, pelancar dan terminal informasi. Pasalnya KIM mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi pembangunan.





KABID SKDI DISKKOMINFO PROVSU Hj. AFINI, SE

Penyerahan Hadiah Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Sumatra Utara Tahun 2016
 Auditorium RRI Medan, Rabu 27 April 2016

PANGLIMA TNI DAN PLT GUBSU RESMIKAN MESJID DAN GEREJA RELOKASI PENGUNSI SINABUNG DI SIOSAR

Kabanjahe, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto dan Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si secara simbolik meresmikan masjid dan gereja di lokasi relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Rabu (27/4/2016). Hadir dalam kesempatan itu Pangdam I/BB Mayjend Lodewyk Pusung, Kapolda Sumut Irjen Raden Budi Winarso, Bupati Karo Terkelin Brahmama, Dan Lanud Soewondo Medan Kol (PNB) Arifien Syahrir, Dan Lantamal Belawan Kol Widodo Dwi Purwanto dan ribuan masyarakat dan pengungsi Gunung Sinabung.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Gatot Nurmayanto mengatakan, Mesjid Al-Hikmah dan Gereja Oikumene Bahtera Kasih diharapkan menjadi perekat kerukunan umat beragama sekaligus menjadi symbol harmonisasi sosial kemasyarakatan di Siosar. "Gereja dan mesjid adalah lambang kebaikan dan kasih Tuhan. Semoga dapat memberi semangat bagi umat Kristiani. Masjid juga tempat beribadah umat Islam. Pemeluk agama harus rukun damai," pesan Gatot.

Gatot menyatakan, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap bencana letusan Gunung Sinabung. Perhatian tersebut dibuktikan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Karo, usai dilantik menjadi kepala negara. "Berdasarkan laporan bahwa erupsi berkepanjangan, maka presiden memutuskan untuk membangun relokasi, kemudian memerintahkan kepada saya. Seminggu kemudian saya kemari dan berkoordinasi. Tempat ini ditentukan bersama-sama dan merupakan yang terbaik dari berbagai alternatif. Saya senang, saai ini semua pengungsi yang hadir di sini sudah bisa tersenyum," kata Gatot.

Sementara Plt Gubsu mengatakan, pada Tahap I, pemerintah bersama TNI telah menyiapkan lokasi dan perumahan bagi 370 KK pengungsi Sinabung dari 3 desa yakni Desa Simacem, Bekerah dan Suka Meriah. "Tidak hanya tempat tinggal, para pengungsi juga mendapat lahan pertanian yang dapat diolah untuk membangun kehidupan yang baru," ujar Plt Gubsu.

Selain itu, pemerintah juga membangun sarana dan prasarana pendukung diantaranya kantor desa, balai desa, jambur, kamar mandi umum, gapura dan rumah ibadah. "Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung yakni jalan tersier, drainase, listrik, jalan usaha tani ke lokasi lahan pertanian, pustu, sekolah, terminal, land clearing TPU dan bantuan reprodi," tambah Plt Gubsu.

Semua sarana tersebut, ujar Plt Gubsu, merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan kembali kehidupan masyarakat yang sebelumnya terpuruk akibat bencana Gunung Sinabung untuk bangkit kembali, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya. "Kita mengimbau masyarakat yang telah mendapatkan rumah untuk menempati rumahnya dan memanfaatkan lahan pertanian yang telah diberikan," imbau Plt Gubsu.

Pembangunan gereja dan mesjid tidak hanya menjadi sebagai tempat ibadah, namun juga memiliki fungsi sosial kemasyarakatan dan memupuk toleransi antar pemeluk agama. "Pemeluk agama yang berbeda-beda dapat menjalin hubungan dalam kegiatan sosial ekonomi sehingga pemulihan kehidupan seluruh masyarakat relokasi Siosar mampu tumbuh dan berkembang dengan cepat mengejar ketertinggalan dengan desa-desa lainnya," pesan Plt Gubsu.

Bupati Karo, Terkelin Brahmama menjelaskan, penyiapan relokasi Tahap II ditargetkan akan tuntas Juni 2016 mendatang untuk menampung 1.680 KK dari empat desa yakni Desa Guru Kinayan, Berastepu, Durintonggal dan Gamber. "Relokasi Tahap II dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah tidak lagi menyiapkan lahan karena izin pembukaan lahan hutan untuk relokasi Tahap II tidak keluar. Maka diputuskan, masyarakat secara berkelompok mencari sendiri areal untuk pembangunan rumah dan ladang. Sedangkan fasilitas umum pendukung perumahan nantinya disiapkan pemerintah," jelas Terkelin.

Sebagai kompensasi, sebut Terkelin, pemerintah memberikan bantuan alokasi pembangunan rumah Rp 110 juta tiap KK dengan rincian untuk penyediaan tanah dan pembangunan rumah sebesar Rp 59,4 juta dan pembelian lahan pertanian Rp 50,6 juta. "Tenggat waktu yang kita berikan hingga Juni 2016 ini. Kita berharap, alokasi dana yang diberikan dapat bermanfaat dalam membangun kehidupan yang baru," harap Terkelin. Erupsi Gunung Sinabung telah berlangsung lebih 5 tahun sejak erupsi pertama tahun 2010 dan terus berlangsung hingga April 2016. Akibatnya, 9.322 jiwa terpaksa hidup di 9 penampungan hingga saat ini.

SEKRETARIS DISKOMINFO PROVINSI SUMATERA UTARA H. M. AYUB, SE

Menghadiri Peresmian Gereja Oikumene Bahtera Kasih dan Mesjid Al-Hikmah oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo
Kawasan Relokasi Siosar Kabupaten Karo, Rabu 27 April 2016



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU, H. M. AYUB SE

Menghadiri Bimbingan Test/Study Putra Putri Keluarga Anggota Korpri Provsu
Aula Martabe Kantor Gubsu, Kamis 28 April 2016



BUKA BIMBINGAN TEST BAGI ANAK ANGGOTA KORPRI PLT GUBSU MOTIVASI 558 PUTRA/PUTRI ANGGOTA KORPRI

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si membuka Pelaksanaan Bimbingan Test/Study intensif bagi 558 putra-putri anggota keluarga Korpri Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Ruang Martabe, Kantor Gubsu, Kamis (28/4). Bimbingan bertujuan untuk persiapan bagi anak-anak dan keluarga anggota Korpri menghadapi ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri.

Hadir dalam kesempatan Sekda Provsu H. Hasban Ritonga yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Korpri Sumut, Ketua Panitia Hj Nurula dan ratusan peserta bimbingan serta orang tua. Bimbingan Tes intensif dilaksanakan oleh Sonny Soegama Colagge bertempat di SMAN 3 Medan selama satu bulan penuh mulai tanggal 27 April hingga 27 Mei 2016.

Plt Gubsu dalam pembukaan tersebut memberikan motivasi kepada para putra-putri anggota Korpri yang terdiri 57 anak-anak PNS di jajaran SKPD dan Biro Sekretariat Daerah Provsu dan 501 anak utusan dewan pengurus Korpri Kabupaten/kota se Sumut. "Prestasi dan keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Kalian harus disiplin mengikuti pr dan ogram ini dari awal hingga berakhir," imbuh Plt Gubsu.

Kepada anak-anak peserta bimbingan intensif Plt Gubsu juga menghimbau untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban serta simulasi seleksi bersama. "Hargai ketauladanan orang tua dan guru. Teruslah belajar, kuasai ilmu pengetahuan serta santun dan selalu berdoa," ujar Plt Gubsu.

Dikatakannya, dengan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN persaingan bukan saja berlaku antar daerah, namun persaingan sudah berlaku di tingkat regional. "Sekarang persaingan kita bukan hanya dengan provinsi lain, namun kita juga bersaing dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos dan lainnya. Tidak ada cara lain untuk mampu bersaing selain meningkatkan SDM," ujar Plt Gubsu.

Untuk itu, Plt Gubsu kembali menekankan agar para peserta bimbingan test/study dapat belajar lebih keras agar dapat masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai pilihannya. "Ini adalah bentuk kepedulian dari Pemerintah Provinsi agar anak-anak anggota Korpri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan handal terlebih lagi dengan berlakunya MEA," katanya.

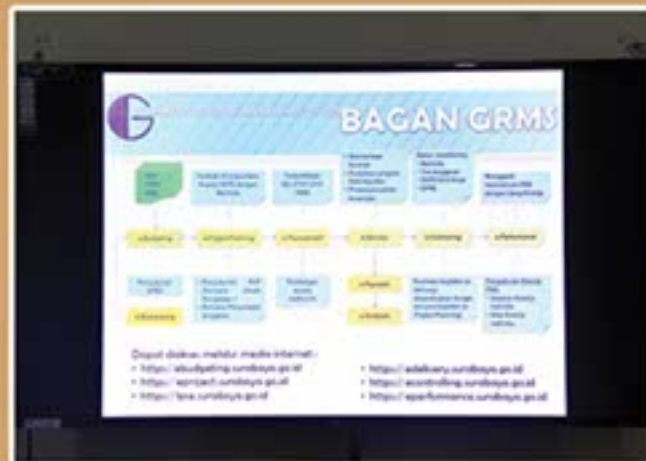
Dikatakan Plt Gubsu, berdasarkan laporan tahun lalu tingkat kelulusan peserta mencapai 23%. Untuk itu dia berharap tahun ini lebih banyak lagi jumlah peserta yang lulus dibanding tahun lalu. Harapan yang sama diungkapkan Sekda Provsu Hasban Ritonga. Dia mengatakan tahun ini harus ada peningkatan, dan menghimbau para peserta didik belajar lebih giat.

Nurula mengatakan selain intensif, dilaksanakan juga bimbingan tes/ studi regular bagi 45 orang yang pelaksanaannya selama 1 tahun yang diikuti kelas X, XI dn XII bertempat di SSC Jalan Iskandar Muda. Tujuan dari kegiatan ini menurutnya memberikan akses, respon, wawasan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dan memajukan mutu pendidikan dan sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara.

KUNKER KPK KE DINAS KOMINFO PROVSU



Medan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum didampingi oleh Sekretaris Diskominfo Provsu H. M. Ayub, SE, Kabid Aptel Diskominfo Provsu Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si, Kasi e – Governance dan Aplikasi Diskominfo M. Alfian Jauhari S. Hut serta Plt. Kasi Pemberdayaan Telematika Diskominfo Provsu Abdul Qodir Zuhdy, ST menerima kunjungan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka rencana aksi program pemberantasan korupsi Tahun 2016 di Ruang kerja Dinas Kominfo Provsu, Kamis, (28/04).



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
 Rapat Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 bersama KPK
 Ruang Rapat Kadis Kominfo Provsu, Kamis 28 April 2016

PEMROVSU TIDAK BISA PENUHI PERMINTAAN INALUM SOAL PENUNDAAN JAWABAN KEBERATAN PAJAK APU

Medan, Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Inalum di ruang kerjanya lantai 9 Kantor Gubsu, Jumat (29/4). Dalam kesempatan itu, PT Inalum meminta Pemprovsu menunda jawaban atas keberatan mereka terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pajak air permukaan umum (APU) yang ditetapkan Pemprovsu. Hadir dalam pertemuan itu GM Anggaran Afrizal dan GM Legal Satyawarman Tarigan, sementara Sekda Provsu didampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Razali S.Sos dan Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Provsu Haris Rangkuti dan Plh Kadis Kominfo M. Ayub.

Dalam kesempatan itu, Afrizal mengungkapkan harapan PT Inalum agar Pemprovsu tidak langsung menjawab keberatan mereka atas SKPD pajak APU yang ditagih Dinas Pendapatan Daerah setiap bulannya. "Kalau bisa diberi jeda waktu penolakan atas keberatan kami enam bulan atau minimal tiga bulan. Karena sesuai aturan yang ditetapkan keberatan boleh paling lama satu tahun," kata Afrizal. Dikatakan Afrizal saat ini PT Inalum belum mapan dan masih membutuhkan modal yang cukup untuk menjalankan operasi Peleburan Aluminium terpadu yang menguntungkan, aman dan ramah lingkungan.

Menanggapi hal itu, Sekda Provsu yang ditanyai wartawan mengatakan pihaknya memaklumi kondisi PT Inalum, namun juga terikat dengan ketentuan dan mekanisme. "Kita memaklumi kondisi mereka. Tapi kita kan punya mekanisme yang sudah terpolo. Kalau kita tidak lakukan jawaban setiap bulan, maka penundaan itu tidak diakomodir dan dapat mengganggu sistem keuangan Pemprovsu," jelas Sekda Provsu menjawab wartawan.

Dikatakannya, belanja Pemerintah Provinsi sudah disesuaikan dengan target pendapatan, sehingga apabila target tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap realisasi APBD secara keseluruhan. Menurut Sekda, pihaknya melalui Dinas Pendapatan Daerah sudah mengkonsultasikan dengan BPK dan rekomendasi BPK memang harus dijawab segera atas keberatan PT Inalum itu segera.

Saat ini persoalan pajak APU antara Pemprov Sumut dan PT Inalum sedang dalam proses pengadilan pajak. Pertemuan tadi, PT Inalum semacam meminta pendudukan jawaban atas keberatan mereka. Agar keberatan mereka atas SKPD didiamkan dulu. Tapi kan sama saja, PT Inalum punya mekanisme penganggaran, kita juga punya," ujar Sekda Provsu.

Dalam kesempatan itu, Sekda berharap proses pengadilan pajak bisa segera selesai, agar ada kepastian hukum dan dapat menjadi acuan bersama Inalum dan Pemprov Sumut. "Sekarang kita menyesuaikan, menerima berapa yang mereka bayar," kata Sekda Provsu.

Kami hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Proses yang diperkenankan apabila pihak-pihak beda pendapat. "Proses hukum tidak harus merusak silaturahmi dan koordinasi antara Pemprovsu dan Inalum. Tetap dalam komitmen yang sama membangun Sumut, silaturahmi tetap terjaga," harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Razali mengatakan pertemuan tidak membicarakan soal tarif, karena masih dalam proses hukum. Dikatakannya SKPD dikirimkan perbulan karena sifat pemakaian air dihitung per bulan. Setiap SKPD yang dikirimkan, PT Inalum tetap menyampaikan soal keberatan. "Karena itu kita harus tolak pada bulan itu juga, karena nanti jadi temuan.

Maksud PT Inalum tolong beri waktu jawaban itu. Kami sudah konsultasi dengan BPK, rekomendasi BPK memang harus dijawab segera. Kita tidak bisa memperlama jawaban," ujar Razali. Menambahkan, Kabag Anggaran Haris mengatakan di Biro Keuangan juga ada alur kas, dimana salah satu sumbernya pajak air. "Kalau ada permasalahan, kami juga tidak bisa realisasikan belanja yang sudah terencana," kata Haris.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Mendampingi Sekda Provsu Menerima Audiensi PT. Inalum
Ruang Kerja Sekda Provsu, Jumat 29 April 2016





PERINGATAN HARDIKNAS TINGKAT SUMUT PLT GUBSU IMBAU PEREMPUAN BEKALI DIRI SEBAGAI PENDIDIK UTAMA DALAM KELUARGA

Lubuk Pakam, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengimbau kaum perempuan untuk terus membekali diri dengan berbagai keahlian, karena perempuan merupakan pendidik pertama sekaligus pendidik utama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Demikian amanat Plt Gubsu saat menjadi irup upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Sumut yang berlangsung di Alun-alun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, Lubuk Pakam, Senin (2/5/2016). Peringatan Hardiknas tersebut sekaligus pencanangan Gerakan Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) Deliserdang.

Hadir Direktur Bindiktara Kemendikbud DR Erman Syamsudin, Ketua TP PKK Sumut Evi Diana Erry, Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan, Wakil Bupati H. Zainuddin Mars, Ketua TP PKK Deli Serdang Hj. Yubita Ashari Tambunan, Ketua DPRD Deliserdang Ricky Pandana Nasution, SE, Sekdakab Deliserdang Drs. H. Asrin Naim, jajaran pimpinan FKPD Deliserdang, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Deliserdang Dra Wastianna Harahap, jajaran SKPD Deliserdang, Camat dan para guru.

Dalam sambutannya, Plt Gubsu menyatakan, perempuan wajib meningkatkan kemampuannya, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik pertama dan juga sebagai pendidik utama dalam keluarga. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sehingga memberi dampak besar pada peningkatan pendidikan dan kualitas hidup generasi mendatang.

"Saat ini perempuan marjinal tersebar di berbagai sektor kehidupan, baik sektor publik maupun sektor domestik. Bahkan perempuan termarginalkan dalam bidang pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kebijakan public, hak-hak dasar, perempuan belum terpenuhi, kekerasan dalam rumah tangga masih ada, ketidaksetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dalam kesetaraan. Begitu juga dalam bidang politik dan kesehatan," sebut Plt Gubsu.

Berdasarkan data statistik, populasi penduduk Sumut tercatat sebanyak 13.326.307 jiwa, 6.648.190 diantaranya laki-laki dan 6.678.117 jiwa perempuan. Data ini memberikan informasi jumlah perempuan di Sumut lebih tinggi dibanding populasi laki-laki di Sumut. "Jumlah penduduk perempuan secara kualitatif merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara," sebut Plt Gubsu.

Plt Gubsu juga menegaskan, permasalahan perempuan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, tetapi juga dunia internasional. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan 8 tujuan Pembangunan Milineum Development Goals (MDGs) dengan menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan yakni, pendidikan untuk semua, persamaan gender dan peningkatan kesehatan ibu dan penghapusan kemiskinan. "Saya berharap program Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan perempuan di Sumut. Tentu program ini harus mendapat dukungan dari semua pihak," harap Plt Gubsu.

Sebelumnya, Plt Gubsu membacakan pidato Mendikbud Anies Baswedan yang menekankan pada dampak revolusi teknologi menjadi pendorong lompatan perubahan yang akan berpengaruh pada cara kita hidup, cara kita bekerja dan tentu saja cara kita belajar. "Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berpesan, generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan keilmuan untuk menjawab tantangan jaman di masa mendatang.

Tidak kalah penting, pesan Mendikbud dalam Hardiknas kali ini adalah komponen kompetensi abad 21 yang menuntut anak-anak Indonesia harus mampu menghadapi berbagai masalah masalah kompleks dan tidak terstruktur. Untuk itu dibutuhkan kompetensi kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi serta kemampuan kolaborasi.

Sementara Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Mendikbud DR Erman Syamsudin mengatakan, pencanangan GP3M merupakan langkah mengenang kembali sosok RA Kartini yang gigih telah memperjuangkan hak-hak asasi kaum perempuan. "Selain RA Kartini, kita juga mengenal pejuang wanita lainnya seperti Maria Walanda Maramis dari Sulawesi Utara, Ina Lokollo dari Ambon dan masih banyak lagi yang lain termasuk dari Sumut dan Deli Serdang," sebut Erman.

Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan menyebutkan, pendidikan di Deliserdang merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat perhatian khusus dengan mengandalkan tiga pilar pembangunan daerah yakni pemerintah, partisipasi masyarakat serta dukungan swasta. "Pemkab Deliserdang menyambut gembira dicanangkannya Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal. Gerakan ini salah satu diantaranya adalah sarana untuk mendidik dan memberdayakan perempuan marjinal sehingga mereka nantinya akan memiliki kemampuan dalam meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup sebagai ibu rumah tangga," sebut Azhari.

Dalam memeriahkan peringatan Hardiknas tingkat Sumut, panitia menggelar tarian tradisional "Hadrah" dengan melibatkan 1.350 orang penari siswa perempuan mengenakan pakaian adat dari sejumlah SD di Deliserdang. Tarian massal ini sukses memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) sekaligus rekor dunia.

Peringatan Hardiknas tersebut juga dimeriahkan berbagai atraksi hiburan lainnya seperti tari 8 etnis yang ada di Deliserdang, atraksi Polisi Cilik (Pocil), pementasan 100 siswa SMP yang membacakan puisi yang meterinya berkaitan dengan kehidupan perempuan. Sebelumnya, pihak penyelenggara juga dilaksanakan Gerak Jalan Beregu di Alun-alun Pemkab Deliserdang pada Minggu (1/5/2016).

KABID PUHK DISKOMINFO PROVSU Hj. ROSMIDAR, S.Ag, M.Pd
Menghadiri Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)
Alun-Alun Pemkab Deli Serdang, Senin 2 Mei 2016



TERIMA KUNKER KOMISI V DPR RI, PLT GUBSU HARAPKAN KOMISI V DPR RI IKUT PERJUANGKAN PENAMBAHAN ANGGARAN JALAN SUMUT

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si meminta Komisi V DPR RI ikut memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Sumut. Harapan itu disampaikan Plt Gubsu saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Selasa (3/5/2016).

Rombongan dipimpin H. Muhiddin M Said bersama anggota Komisi V DRR RI Hanna Gayatri (Fraksi PAN), Bakrie (Fraksi PAN), Bahrum Daido (Fraksi Demokrat), Sigit Soslantomo (Fraksi PKS), Fathan (Fraksi PKB) dan DR. Anton Sihombing (Fraksi Golkar).

Dalam diskusi, Plt Gubsu menyatakan, jalan nasional di wilayah Sumut termasuk yang terpanjang di Indonesia yakni mencapai 2.600 km. Sementara alokasi yang dianggarkan tergolong minim. Alokasi anggaran Ditjen Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Sumut alokasi tahun anggaran 2015 hanya Rp 1.986.540.715.000. Sedang alokasi tahun 2016 menjadi Rp 1.925.253.272.000 atau mengalami penurunan sekitar Rp 60 miliar.

"Jalan nasional di Sumut terpanjang, tetapi alokasi anggaran yang diberikan sangat minim. Sumut hanya mendapat alokasi Rp 1,9 triliun. Alokasi itu juga telah termasuk untuk dana pendamping pembangunan jalan tol. Jauh lebih rendah jika dibanding Provinsi Sulawesi Tengah yang jalannya lebih pendek," ujar Plt Gubsu.

Selain jalan nasional, Plt Gubsu memaparkan, Sumut memiliki jalan provinsi terpanjang dengan mencapai 3.048,5 km, membentang dari Pantai Timur hingga Pantai Barat Sumut. Berdasarkan data terakhir, kondisi kelayakan jalan yaitu jalan baik sepanjang 1.190,19 km (39,04%), jalan sedang sepanjang 1.078,56 km (35,38%), jalan rusak ringan sepanjang 239 km (8,5%) dan jalan rusak berat sepanjang 520,75 km (17,03%).

"Dalam upaya mewujudkan jalan mantap 95% tahun 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyiapkan grand design penanganan jalan provinsi secara bertahap mulai tahun 2014-2018. Tentu itu membutuhkan biaya yang cukup besar, baik untuk pembangunan maupun pemeliharaan. Alokasi yang tidak sedikit ini akan sangat berdampak kepada ketersediaan anggaran APBD Sumut setiap tahunnya," jelas Plt Gubsu.

Apalagi Danau Toba kini menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang membutuhkan infrastruktur pendukung seperti ketersediaan jalan nasional yang baik, jalan tol dari Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) dan infrastruktur lainnya.

"Kami berterimakasih karena jalan tol sudah dalam proses sejak tahun 80an, Sumut hanya miliki jalan tol panjang 34 km saja. Alhamdulillah, nanti tahun 2017, jalan tol di Sumut akan bertambah menjadi 120 km dengan beroperasinya tol Medan menuju Binsur dan dari Medan menuju Tebing Tinggi," papar Plt Gubsu.

Berdasarkan perencanaan, Plt Gubsu mengatakan, jalan tol Medan menuju Tebing Tinggi telah dapat diantasi tahun 2017 mendatang. "Kami sangat berharap, jalan tol bisa terus diperpanjang sampai ke Pematang Siantar hingga Pangkajene di pesisir Danau Toba, kemudian menuju sejumlah kawasan di pesisir Pantai Timur yakni melintasi Kota Kisaran hingga Labuhan Batu dan diterangi hingga ke Dumai di Provinsi Riau," harap Plt Gubsu.

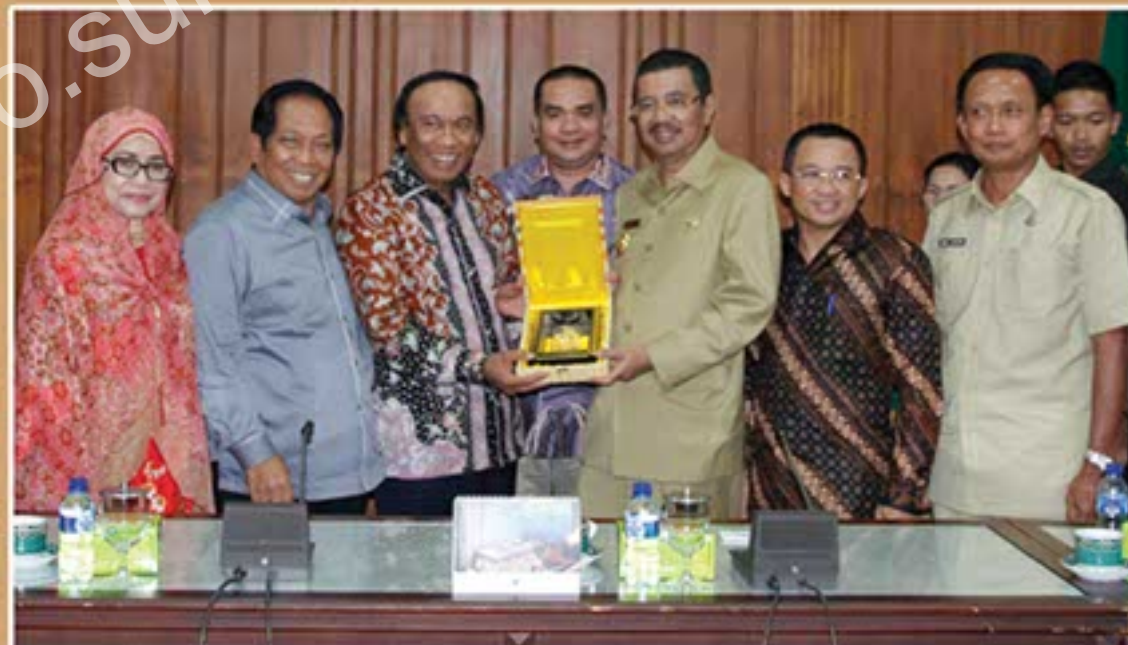
Sementara DR Anton Sihombing (Fraksi Golkar) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut menyatakan Komisi V DPR RI akan menghimpun seluruh informasi terkait pemantapan jalan nasional di Sumut. Berdasarkan tinjauan dan hasil Kunker, terungkap informasi nasional di Sumut sepanjang 2600 km, hanya 81% kategori mantap dari target 98%.

"Ini yang akan kami kejar. Mudah-mudahan teratasi. Kondisinya cukup memprihatinkan, seharusnya Sumut sebagai provinsi terbesar ke empat di Indonesia dengan populasi penduduk mencapai 14 juta jiwa, memiliki jalan nasional yang jauh lebih baik," sebut Anton.

Anton menilai, Sumut layak memiliki jalan nasional yang baik, karena Sumut merupakan provinsi strategis di wilayah regional Sumatera. "Mudah-mudahan kedepan jalan nasional di Sumut jauh lebih baik. Persoalan ini akan kami bawa ke Jakarta untuk selanjutnya di godok di komisi nantinya," ujar Anton.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Menghadiri Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Spesifik tentang Penambahan Anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan di Sumatera Utara
Ruang Rapat Beringin Kantor Gubsu, Selasa 3 Mei 2016



SEKDA PROVSU AJAK MASYARAKAT SUMUT PERCAYA DIRI



Medan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) H. Hasban Ritonga, SH mengharapkan, masyarakat Sumut percaya diri untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian dikatakan Sekda Hasban Ritonga saat penyerahan hadiah lomba karya tulis dan foto pers dalam rangka Hari Jadi ke-68 Provinsi Sumatera Utara di Hotel Dharma Deli, Selasa (3/5).

Turut hadir para dewan juri terdiri, Dr. Amin Purnomo, Pershar Lubis, H. Hermansjah, SE, Zulfikar Tanjung, Dr. Dedi Sahputra, Foad Endangsyah, Tarmizi Harva, Ferdi Siregar, dan Irsan Mulyadi.

Sekda Provsu mengatakan saat ini Sumut sangat populer tidak saja di dalam negeri tapi juga ke mancanegara. Walaupun terkada popularitas provinsi ini dari sisi negatif. "Walaupun popularitas itu terkadang membuat kita merenung dan introspeksi," sebut Sekda Provsu.

Namun, lanjut Sekda, semua yang terjadi itu menjadi motivasi bagi masyarakat Sumut untuk bangkit dan percaya diri. Soalnya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Sumut ini cukup potensial. "Tinggal bagaimana cara mengelolanya," ujarnya.

Mengenai lomba karya tulis dan foto pers, Sekda mengapresiasi Diskominfo yang berkesinambungan menggelar kegiatan tersebut. Ke depan diharapkan bisa lebih maksimal dan bila perlu diikuti para akademisi dan mahasiswa. "Bagi kami pemerintah, lomba ini merupakan pesan-pesan pembangunan untuk Sumut sekaligus memotivasi masyarakat untuk membantu pemerintah," ujar Sekda Provsu.

Kadiskominfo Sumut Jumsadi Damanik melaporkan, kegiatan lomba diikuti puluhan insan pers di Sumatera Utara ini mengusung tema "Danau Toba Go Internasional Menuju Sumut Paten".

Kegiatan ini untuk memberikan penghargaan bagi insan pers, sekaligus mendukung Pemprov mengoptimalkan pembangunan di kawasan Danau Toba.

Para pemenang karya tulis di antaranya, juara I Zul Anwar Marbun dari SKM Grogok, juara II T Agus Khaidir (Tribun) dan juara III Partono Budi (Media Sumut). Harapan I dan II Fadmin Prihatin Malau dan Ngatirin (Mimbar Ummat). Sedangkan kategori foto pers, juara I Andru Kosti (Kover Magazine), juara II Kadri Boi (Sindo) dan Hendra (NTMC Polri). Untuk harapan I dan II YP Hariono (Reuters) dan Surya Effendi (Waspada). Selain itu, panitia juga memberikan 25 karya yang masuk nominasi masing-masing kategori



KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Penyerahan Hadiah Lomba Karya Tulis dan Foto bagi Jurnalis dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke-68 Tahun 2016
Hotel Dharma Deli Medan, Selasa 3 Mei 2016







KABID SKDI PROVSU, Hj. AFINI, SE
 Menghadiri Rapat Bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provsu Menjelang Ramadhan
 Aula Kantor Bank Indonesia Medan, Rabu 4 Mei 2016







KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERİYAH, M.Si
Menghadiri Rapat Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) bersama Komisi A DPRD SU
Kantor DPRD SU, Rabu 4 Mei 2016







KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menghadiri Acara Dirgahayu 50 Tahun Harian Medan Pos
Hotel Grand Aston Medan, Senin 9 Mei 2016







KEPALA SEKSI PIP DISKOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.Si

Menerima Kunjungan Kerja Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Ruang Kerja Kepala Seksi PIP Diskominfo Provsu, Rabu 11 Mei 2016

DINAS KOMINFO SOSIALISASIKAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA KE MEDIA

Medan, Dalam rangka mewujudkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang lebih terbuka dan transparansi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu mengadakan sosialisasi kelengkapan barang dan jasa dengan media cetak harian lokal terkait adanya kerjasama Diskominfo Provsu dengan media dalam mempublikasikan program Pemprovsu yang dilaksanakan di Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Rabu (12/5)

Sosialisasi ini dibuka oleh Kadis Kominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum diwakili oleh Kepala Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan Dinas Kominfo Provsu Hj. Rosmidar, S.Ag, M.Pd, didampingi Kepala Seksi Dokumentasi & Perpustakaan yang juga menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kominfo Provsu Marthalisa dan Kepala Seksi Hubungan Lembaga & Kemasyarakatan Abdul Aziz, S.Sos, M.AP yang berperan sebagai moderator serta dihadiri media cetak harian lokal.

Dalam Penjelasannya, Marthalisa menyampaikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur oleh Perpres 34 Tahun 2010 yang juga telah mengalami empat kali perubahan yaitu perubahan Perpres No 35 Tahun 2011, Perpres No 70 Tahun 2012, Perpres No 172 Tahun 2014 dan Perpres No 4 Tahun 2015. "Dalam Perubahan- perubahan Perpres terutama Perpres No 4 tahun 2015 telah ditentukan harus ada budget atau dana yang dikeluarkan atau yang ditampung misalnya lebih dari 200 juta itu harus melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) namun yang dibawah 200 juta dilakukan dengan pengadaan langsung swakelola" Ujar Marthalisa.

Beliau juga menambahkan bahwa dalam syarat pemberkasan itu sama prosesnya, baik melalui LPSE ataupun pengadaan langsung swakelola. Dan juga dalam Proses Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dimana pejabat pengadaan barang dan jasa harus mengadakan berbagai evaluasi atau pemeriksaan melalui 4 tahapan yaitu 1) Evaluasi Administrasi, 2) Evaluasi Teknik untuk mengetahui spesifikasi sesuai dengan yang diminta, 3) Evaluasi Harga dimana harga yang ditawarkan sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Dinas Kominfo Provsu dan 4) Evaluasi Kualifikasi dimana Pejabat Pengadaan barang dan jasa Dinas Kominfo Provsu memeriksa beberapa dokumen diantaranya dokumen keabsahan dari badan usaha, yang didalamnya ada akta pendirian pada badan usaha, disamping itu juga harus dibuat pakta integritas yang isinya berupa pernyataan untuk mencegah dan tidak melakukan KKN. Dan terakhir adalah membuat pengisian formulir isian kualifikasi. Keempat tahapan ini menggunakan sistem gugur dimana jika salah satu tahapan ini tidak terpenuhi maka dinyatakan gagal. Pada akhir sosialisasi, Kadis Kominfo Provsu mengharapkan kerjasama yang baik dengan media, untuk mewujudkan publikasi program Pemprovsu melalui media.





KABID PUHK Hj. ROSMIDAR, S.Ag. M.Pd
Sosialisasi Kelengkapan Barang dan Jasa Ke Media Cetak Harian Lokal
Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Rabu 11 Mei 2016







SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Metro TV
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Rabu 11 Mei 2016





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Menghadiri Pengukuhan Pengurus Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Sumatra Utara Masa Bakti 2016-2021

Rumah Dinas Gubsu, Minggu 15 Mei 2016

PLT GUBSU TAWARKAN DUTA BESAR INDIA PEMBANGKIT

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku, Erry Nuradi, M.Si menawarkan peluang kerjasama bisnis di antaranya pembangunan pembangkit listrik, infrastruktur transportasi, industri perkebunan dan pariwisata.

Hal ini disampaikan Plt Gubsu saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India, Nengcha Lhou-vum Mukhopadhyaya didampingi Konjen India Shalia Shah yang membawa delegasi forum bisnis India di ruang kerja Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (17/5). "Kami mempersilakan investor India untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Sumut," ajak Plt Gubsu.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak India untuk menanamkan modal di Sumut khususnya di bidang energi. Dia menjelaskan, pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumut mencapai 1,5 kali pertumbuhan ekonomi. Hari ini kebutuhan dihasilkan 2.000 mega watt untuk Sumut, maka tahun depan ada peningkatan butuh hingga 300 megawatt.

Lebih jauh, Plt Gubsu menjelaskan, Sumut merupakan pusat pengembangan ekonomi di wilayah Barito di antaranya pengembangan KEK Sei Mangkei dan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba. Selain pengembangan industri sawit dan karet, Sumut juga miliki peluang yang bisa dikerjakamkan dalam pembangunan infrastruktur.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Kunjungan Dubes India Bersama Delegasi Forum Bisnis India
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Selasa 17 Mei 2016



PLT GUBSU DUKUNG ICEST 2016 IKA-USM SUMUT



Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mendukung pelaksanaan International Conference of Engineering, Social Science and Technology (ICEST) yang diselenggarakan oleh pengurus Ikatan Alumni Universitas Sains Malaysia (IKA-USM) Sumut. Dukungan tersebut disampaikan Plt Gubsu saat menerima audiensi panitia ICEST IKA-USM di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Selasa (17/5/2016).

Hadir pada audiensi Ketua Program Dr Emmy Erwina, Panitia ICEST 2016 Dr Wan Anayati, Ketua Panitia Dr. Rahmat, Sekretaris IKA USM Ir. Rahmad Setiabudi. Sedangkan Plt Gubsu didampingi Asisten II Ibnu Utomo, Dinas Kominfo Provsu H. M. Ayub, Plt Kadis Sosial Asren Nasution.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu menyatakan, ICEST merupakan kegiatan positif, karena selain mempererat jalinan silaturahmi antara alumni dan sarjana berpengalaman, juga memuat seminar tentang pendidikan juga sangat penting. "Karena dengan ini baik para narasumber dan peserta bisa saling menambah pengetahuan," sebut Plt Gubsu.

Plt Gubsu juga mengatakan, ICEST juga mendukung pengembangan bidang pendidikan di Sumut. "Ini bentuk kepedulian semua pihak terhadap pentingnya dunia pendidikan di Sumut," tambah Plt Gubsu.

Sementara Panitia ICEST 2016, Dr Wan Anayati mengatakan, seminar akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 24 Mei 2016 bertempat di Raz Hotel Medan. "Para peserta para alumni IKA-USM baik berasal dari Sumut maupun dari Malaysia. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri Rektor USM serta Menteri Pendidikan Malaysia juga Dubes Malaysia untuk Indonesia," jelas Anayati.

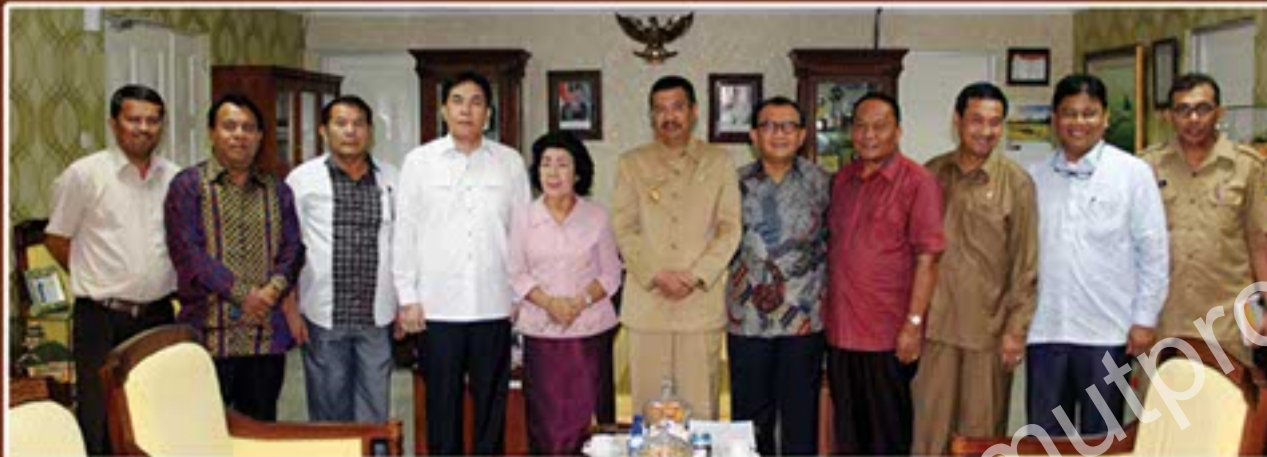


SEKRETARIS DINAS KOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi IKA Universitas Sains Malaysia (USM)
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Selasa 17 Mei 2016



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Mendampingi Plt. Gubsu Menerima Audiensi Panitia Peresmian Taman Memorial GM Pangabean
Ruang Kerja Plt. Gubsu, Selasa 17 Mei 2016



JAMU ATASE PERTAHANAN NEGARA SAHABAT, PLT GUBSU SEBUT NARKOBA MENJADI MASALAH SERIUS

Medan, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengatakan peredaran narkoba dan terorisme menjadi masalah besar mengancam stabilitas keamanan di Sumut. Hal itu disampaikan Plt Gubsu dalam acara jamuan makan siang bersama atase pertahanan negara sahabat di rumah dinas Gubernur Sumut (Gubernuran), Jl Sudirman Medan, Rabu (18/5/2016). Hadir dalam acara tersebut atase pertahanan dari 32 negara sahabat, Wakil Ketua DPRD Sumut Parliansyah Harahap dan jajaran SKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu menegaskan, aksi terorisme tetap mengancam, tidak hanya di Jakarta sebagai ibukota negara tetapi di sejumlah kawasan lain, termasuk di Sumut. "Namun untuk terorisme memang ada kelompok-kelompok kecil yang melakukan aksinya tapi sudah ditangani oleh pihak keamanan. Kini tinggal persoalan peredaran narkoba dan ini juga menjadi problem nasional," ujar Plt Gubsu.

Untuk itu, Plt Gubsu berharap kunjungan 32 atase pertahanan negara sahabat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan. "Kita berharap dari kunjungan atase keamanan ke Pemprov, para atase pertahanan juga akan mengunjungi Kodam. Setelah itu rombongan akan berkunjung ke Belawan dan melihat Angkatan Udara kita," ujar Plt Gubsu.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubsu juga menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki Sumut kepada Atase Pertahanan yang hadir, mulai dari potensi populasi penduduk mencapai 14 juta jiwa dan merupakan provinsi terbesar keempat di Indonesia. "Dengan penduduk yang besar tersebut, Sumut memiliki dua pantai yakni pantai barat yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan pantai timur yang berbatasan dengan Selat Malaka," jelas Plt Gubsu.

Selain itu, Sumut memiliki 8 etnis lokal yang hidup berdampingan secara harmonis dengan suku pendatang. "Masyarakat lokal di Sumut hidup berdampingan secara harmonis dengan suku pendatang. Sumut yang multi etnis itu juga memiliki hubungan toleransi antar umat beragama sangat baik. Persoalan terorisme dan peredaran narkoba yang masih menjadi masalah terbesar di Sumut," sebut Plt Gubsu.

Sumut juga merupakan provinsi andalan di Indonesia yang menjadi salah satu pintu gerbang bagian barat Indonesia. Kaya akan potensi perkebunan, terutama kelapa sawit, karet, kakao dan juga kopi. Tidak lupa Plt Gubsu mengajak Atase Pertahanan dari negara sahabat untuk mengunjungi Danau Toba, salah satu destinasi wisata unggulan nasional yang jaraknya hanya sekitar 180 km dari kota Medan.

"Selain itu, Sumut juga memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke di Kabupaten Simalungun yang nantinya terintegrasi dengan pelabuhan internasional Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara," terang Plt Gubsu.

Sementara Atase Pertahanan dari United Kingdom, Col Andrian Cambell Black, mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumut yang telah menyambut dengan ramah dan bersahabat. Cambell juga menyatakan, pihaknya sebelumnya telah mengunjungi Aceh saat terjadinya tsunami. Sejumlah Atase Pertahanan yang hadir berasal dari United Kingdom, Mexico, USA, German, Australia, Pakistan, Jepang, Thailand, Polandia, Vietnam, China juga Korea.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Menghadiri Jamuan Makan Siang Bersama Atase Pertahanan Militer Negara Sahabat

Rumah Dinas Gubsu, Rabu 18 Mei 2016

SEKDAPROVSU DAN OMBUDSMAN RI BAHAS PENGADUAN WARGA

Medan, Ombudsman RI yang dipimpin Yustus Mafurbong dari Ombudsman RI Pusat datang beraudiensi ke Kantor Gubsu, Kamis (19/05). Yustus datang bersama Pamorti dan Fika Taufiqurohman dan perwakilan Ombudsman Sumut Dedi. Audiensi tersebut diterima Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH yang didampingi Plt Ka. Inspektorat Provsu Fuad, Kabiرو Hukum Setdaprovsu Sulaiman, Sekretaris BPPT Provsu Maike Ritonga, Plh. Kadis Kominfo Provsu M. Ayub dan Kabiرو Pemerintahan Setdaprovsu Nouval.

Yustus mengatakan bahwa audiensi dimaksudkan untuk mendiskusikan kepada Pemprovsu terkait pengaduan masyarakat kepada Ombudsman RI yakni pengaduan kelompok Tani Jaya Kembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki terkait dugaan penundaan berlari oleh pemerintah Kabupaten Langkat terkait proses penyelesaian konflik antara pelapor dengan PT Amal Tani mengenai Tanah Garapan.

Selanjutnya pengaduan dari masyarakat Desa Bintuas dan Desa Buburan terkait dugaan penundaan berlari oleh Pemerintah Mandailing Natal terkait proses penyelesaian sengketa kebun plasma masyarakat Desa Bintuas dan Desa Buburan dengan PT RMM dan PT DiS. Selain itu pengaduan dari Binsar P Nainggolan atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah kabupaten Simalungun yang menguasai tanah seluas 881 m2 (Termina Sosorsaba Parapat) milik ahli waris Alm. Laban Sirait.

Terkait pengaduan tersebut Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dadanya berasal dari APBN dan/atau APBD ingin berdiskusi kepada Pemprovsu untuk tindak lanjut penyelesaian masalah dimaksud. "Salah satu tugas Ombudsman adalah menangani keluhan masyarakat, oleh karena itu Ombudsman ingin mendiskusikan keluhan masyarakat dimaksud kepada Pemprovsu sebagai perwakilan pemerintah Pusat. Karena belum ada respon dari pemerintah daerah setempat," ujar Yustus.

Selain itu Yustus juga mengatakan bahwa Ombudsman RI juga akan mengadakan Program Kepatuhan yakni Penilaian Kepatuhan Pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penilaian ada yang disebut zona hijau yaitu penilaian terhadap tingkat pelayanan yang buruk (kurang baik), zona kuning penilaian tingkat pelayanan sedang dan zona hijau tingkat pelayanan yang tinggi (baik). "Akan ada penilaian terhadap kinerja SKPD-SKPD yang ada di Pemprovsu tentang pelayanan publik dan tim ketetapan tim penilai tanpa pemberitahuan," ujarnya

Menanggapi hal tersebut Sekda Provsu mengatakan bahwa Pemprovsu juga sependapat dengan Ombudsman RI untuk dapat mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Namun lanjutnya, kewenangan pemerintah provinsi sangat terbatas oleh karena adanya otonomi daerah. Meskipun demikian Sekda Provsu mengatakan Pemerintah Provinsi akan berusaha mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pertemuan dan duduk bersama dengan pihak-pihak yang bertikai.

Dikatakan Sekda Provsu untuk penyelesaian masalah ini perlu adanya pertemuan dengan berbagai pihak agar semua pihak akan lebih jelas mengetahui duduk permasalahannya. Dia berharap pertemuan ini bukan hanya kepada pemda dan pihak yang bertikai tetapi juga dirasa perlu adanya kehadiran dari Ombudsman RI dan dari Pemerintah Pusat untuk membahas permasalahan ini. Karena kalau dilihat permasalahannya masih menyangkut kewenangan pemerintah pusat. "Pemprovsu berharap peran serta ombudsman RI dan pemerintah pusat untuk duduk bersama membicarakan masalah yang dikeluhkan masyarakat tersebut," sebut Sekda Provsu.

Sekda Provsu juga mengatakan bahwa Pemprovsu sangat mengapresiasi rencana Ombudsman untuk melaksanakan program kepatuhan terhadap pemerintah daerah. Karena dengan program tersebut dapat sebagai bahan evaluasi bagi SKPD-SKPD yang ada di Pemprovsu maupun di kabupaten/kota sejauhmana tingkat pelayanan pemprovsu maupun kabupaten kota terhadap masyarakat. "Pemprovsu menyambut program ini dan berharap Pemprovsu dan kabupaten/kota se Sumut berada pada zona hijau," ujar Sekda Provsu.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Mendampingi Sekda Provsu Menerima Audiensi Ombudsman Republik Indonesia
Ruang Kerja Sekda Provsu, Kamis 19 Mei 2016





KABID POSTEL DISKOMINFO PROVSU GELORA VIVA SINULINGGA, SE, MM
 Memimpin Rakor Pembuatan *Call Center* "112" untuk Sembilan Kabupaten/Kota di Sumut
 Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Kamis 19 Mei 2016





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Memimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun
Halaman Kantor Diskominfo Provsu, Jumat 20 Mei 2016



RAHMAT SHAH KEMBALI TERPILIH SEBAGAI KETUA PMI SUMUT

Medan, Prestasi yang dicapai selama lima tahun membuat Dr. H. Rahmat Shah kembali dipercaya memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara (Sumut) periode 2016-2021. Dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) PMI Sumut ke-10 yang digelar di The Legend Hall 'Rahmat' International Wildlife Museum & Gallery Jalan S Parman Medan, Sabtu dan Minggu (21-22/5), Rahmat Shah terpilih secara aklamasi.

Ketua pelaksana, dr Utama Abdi Tarigan SpBP (K) menjelaskan, Musprov PMI Sumut ke-10 diikuti 31 Pengurus Cabang PMI Kabupaten/Kota sebagai pemilik suara. "Dari 32 kabupaten/kota di Sumatera Utara, kita memiliki pengurus di 31 kabupaten/kota sebagai pemilik suara minus 1 kabupaten Pakpak Bharat," ucap dr Utama.

Turut hadir Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuriadi, M.Si Wakil Ketua Bidang Penanganan Bencana PMI Pusat, Letjen Sumarsono, SH, Kepala BNN Sumut, Wakil Bupati Langkat, PJ Walikota Pematangsiantar, Dewan Kehormatan PMI Sumut, DPRD Kabupaten/Kota, Tokoh Pemuda Kodrat Shah, tokoh agama, PMR dan Sukarelawan, juga pimpinan beberapa rumah sakit di antaranya RS Murni Teguh dan RS USU.

Plt Gubsu yang membuka Musprov PMI Sumut ke-10 memberi apresiasi atas program kerjasama yang telah dilakukan PMI Sumut di bawah kepemimpinan Rahmat Shah. Musyawarah diharapkan dapat membuat keputusan penting yang menunjang pelayanan PMI Sumut dalam pelayanan kemanusiaan di Sumut.

"Saat ini Sumut memiliki 26 ribuan kantong darah, masih belum mencukupi kebutuhan sebesar 43 ribuan. Ke depan setiap rumah sakit hendaknya memiliki Bank Darah. PMI Sumut diharapkan lebih cepat menanggapi bencana seperti yang sudah dilaksanakan lima tahun ini," ucap Plt Gubsu seraya berjanji membantu pendanaan PMI Sumut pada APBD yang akan datang.

Letjen Sumarsono juga megaku ba--ngga dengan perbaikan signifikan yang diperbuat Rahmat Shah di PMI Sumut. Dari ketersediaan stok darah juga kegiatannya. Ke depan, PMI Sumut diharapkan terus mendukung pemerintah dalam penanganan masalah kemanusiaan. Hal ini mengingat Sumut berada di kawa--san rawan bencana (ring are).

Sementara itu, Rahmat Shah bertekad menjaga kepercayaan yang diberikan dengan meningkatkan pencapaian PMI Sumut di masa datang. Seperti diketahui, sejak ditunjuk memimpin PMI Sumut tahun 2011, Rahmat Shah berhasil meningkatkan ketersediaan kantong darah dari enam kantong menjadi seribu kantong. Di mana PMI Sumut telah meneken MoU dengan 17 instansi yaitu 8 kampus, TNI, Polri, Pemprovsu, MUI Sumut, BNN Sumut, RS USU, HPMI dan MPW PP Sumut serta telah memiliki 12 UTD.

PMI Sumut juga berhasil membangun gedung dan citra yang baik dengan aktif dalam penanganan bencana. Seperti erupsi Gunung Sinabung, banjir dan gempa pating bellung, evakuasi pesawat Hercules C-130, hingga mendamaikan konflik. Rekor MURI untuk pendonor pemula terbanyak hingga menjadikan materi kepalangmerahan sebagai mata kuliah di kampus. "Semua prestasi itu bisa diraih karena kebersamaan di antara pengurus. PMI Sumut bukan tempat untuk mencari pamrih, tetapi tulus melakukan pelayanan pada masalah-masalah kemanusiaan. Inya Allah, niat yang baik akan selalu diridhai dengan hasil yang baik," tutur Rahmat Shah.

Pembukaan Musprov PMI Sumut ke-10 ditandai dengan pemukulan gong oleh Plt Gubsu dan PMI Pusat. Pada kesempatan itu panitia menyerahkan plakat penghargaan kepada Pemprovsu, PMI Pusat, BNN Sumut, TNI dan Polri serta pengurus PMI Sumut periode 2011-2016.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menghadiri Musyawarah Provinsi ke-10 Palang Merah Indonesia Sumatera Utara
Aula Legenda Rahmat Gallery Medan, Sabtu 21 Mei 2016



RAKOR KOMINFO, MOMEN PERCEPAT PELAYANAN PUBLIK ERA REFORMASI BIROKRASI

Medan, Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Se-Indonesia kali ketiga kembali menggelar Forum Group Discussion(FGD) yang dikemas dalam bentuk rapat koordinasi di Medan Sumatera Utara, Jumat (27/5). Rakor digelar dalam upaya mencari formula guna meningkatkan pelayanan publik di era reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Forum Group Discussion (FGD) sudah dua kali dilaksanakan di Jawa Timur dan telah menghasilkan beberapa poin penting terkait cara peningkatan pelayanan publik guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi bidang komunikasi dan informatika. Rakor kali ketiga yang dilaksanakan di Hotel Grand Serela Medan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si.

Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Se-Indonesia, Eddy Santos mengatakan, tujuan dari FGD adalah menyamakan persepsi dan tata kelola terkait cara peningkatan pelayanan publik guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi bidang komunikasi dan informatika.

Selain itu, forum ini juga sebagai wahana untuk mempererat tali silaturahmi agar hubungan antara pusat provinsi dan kabupaten/kota selalu terjalin harmonis, sehingga semua program bidang komunikasi dan informatika dari pusat dapat menembus hingga ke kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Suka tidak suka, mau tidak mau, kominfo harus mampu bekerja dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23 yang merupakan lembaga kewenangan wajib non pelayanan dasar. Kita sadar, bahwa kominfo memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan pemerintah dalam hal pelayanan publik," ujarnya.

Dikatakan Eddy, FGD akan terus dan selalu dilaksanakan secara bergiliran di tiap provinsi se Indonesia. Direncanakan, FGD selanjutnya akan digelar di Provinsi Jambi sekitar bulan Juli 2016. Nantinya, semua hasil FGD dirangkum dan dirumuskan yang selanjutnya akan dilaporkan ke Menteri Kominfo RI serta gubernur masing-masing provinsi se-Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum. mengatakan, Pemprov Sumut saat ini tengah membuat rencana penerapan GBMS (Government Resource Management System) menuju smart province. Dimana, dalam struktur organisasi Dinas Kominfo Sumut terdapat satu bidang khusus yakni Bidang Layanan e-Government.

Bidang ini terdiri dari tiga seksi, yakni Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan, Seksi Pengembangan Aplikasi Publik, dan Seksi Tata Kelola E-Government. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan bertugas memberikan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi. Seksi Pengembangan Aplikasi Publik bertugas menyelenggarakan Ekosistem TIK Smart Province/City dan layanan sama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik. Sementara Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas menyelenggarakan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi serta pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat.

Rakor diikuti 100 peserta yang merupakan perwakilan Dinas Kominfo Provinsi se Indonesia, Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta 10 Dinas Kominfo kab/kota di Jawa Timur.



KADIS KOMINFO PROVSU JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Kominfo Provinsi se-Indonesia
Grand Serela Hotel Medan, Jumat 27 Mei 2016

SYUKURAN PELANTIKAN MENJADI GUBERNUR SUMUT, ERRY OPTIMIS SUMUT HARUS JADI PROVINSI TERDEPAN

Medan. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Kota (Pemko), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Organisasi Kepemudaan (OKP) dan seluruh lapisan masyarakat untuk saling dukung dalam membangun Sumut menjadi provinsi terdepan.

Ajakan tersebut disampaikan Gubsu dalam acara syukuran atas pelantikan dirinya menjadi Gubernur Sumut sisa masa jabatan 2013-2018 yang berlangsung secara sederhana di rumah dinas Gubernur Sumut (Gubernuran) Jl Sudirman Medan, Jumat (27/5/2016).

Hadir dalam acara itu Wakil Ketua MPR Osman Sapta, sejumlah anggota DPR RI, anggota DPD RI, pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut, Sekda Sumut Hasban Ritonga, Bupati dan Walikota 33 Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lintas agama, tokoh pemuda dan jajaran FKPD Sumut serta Aparatur Sipil Negara (ANS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Dalam kesempatan itu, Gubsu menegaskan, potensi yang dimiliki, lebih dari cukup untuk menjadikan Sumut sebagai provinsi terdepan. Selain menjadi provinsi terbesar keempat di Indonesia dengan populasi penduduk mencapai 14 juta jiwa, Sumut juga memiliki potensi bidang pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, tambang, pariwisata dan sumber daya alam lainnya.

"Mari bangun dari tidur panjang. Kita punya banyak potensi yang sangat mungkin untuk kita maksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah pusat telah menunjukkan perhatian serius dengan menerapkan banyak program nasional di Sumut. Ini saatnya kita bangkit," ajak Gubsu.

Perbedaan yang mewarnai Sumut, baik suku, adat istiadat, agama dan lain sebagainya, merupakan kekuatan dalam membangun Sumut ke arah yang lebih baik, bukan malah menjadi jurang untuk mencapai tujuan bersama.

"Kita samplingkan buruknya karena perbedaan pendapat yang menghabiskan energi tanpa membawa kemajuan. Kita bangun Sumut menjadi provinsi terdepan di Indonesia. Inilah cita-cita kita bersama," sebut Gubsu.

Adik kandung mantan Gubernur Sumut Almarhum Tengku Rizal Nurdin ini menyadari, impian tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari seluruh masyarakat Sumut, termasuk akademisi, media massa, pelaku bisnis dan kaum muda.

"Tolong ingatkan saya kalau ada hal yang tidak benar. Mari saling ingat mengingatkan untuk kebaikan. Ini era keterbukaan. Jangan biarkan kekeliruan terus berlanjut. Kita budayakan jujur berkata dan jujur berbuat," harap Gubsu.

"Saya akan menyelesaikan target-target yang belum terpecah. Jadi, visi dan misi sudah terjabar dalam RPJMD yang di breakdown tiap tahun dalam RKPD. Tahun ini tentu harus ada kemajuan-kemajuan pemerintahan," sebut Gubsu.

Gubsu juga mengatakan, salah satu target dalam penyiapan infrastuktur misalnya, Sumut akan berupaya menyilapin Sarana jalan provinsi 80 persen mantap menjadi 90 persen mantap dalam dua tahun anggaran. Demikian juga dengan pengelolaan keuangan ditargetkan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kalau tahun lalu sudah WTP. Tahun ini juga kita harapkan WTP. Begitu selanjutnya. Kita juga harus optimis Sumut bisa menjadi lebih baik. Apalagi, Sumut sekarang mendapat asistensi dari KPK untuk pembenahan di bidang good governance. Jadi program yang ada kita lanjutkan, yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki," harap Gubsu.

Sementara Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodwik Pusung dalam sambutannya menegaskan, akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi "Saya bangga dan mendukung penuh kebijakan Gubsu. Kita harus siap bahu membahu. Sumut harus terdepan dari provinsi lainnya di Indonesia," ujar Lodwik.

Acara syukuran diawali dengan prosesi adat pemberian 'setawar-sedingin' dan tepung tawar kepada Tengku Erry Nuradi dan siteri Evi Diana Erry yang duduk di pelaminan khas Melayu oleh para tokoh.

Usai prosesi adat secara sederhana, acara kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi di samping Gubernuran diselingi hiburan dengan kedatangan dua artis ibukota, Yuni Shara dan Nia Daniati serta seorang artis Kuala Lumpur Aida Hafis.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Menghadiri Ramah Tamah dan Tepung Tawar atas Pelantikan Menjadi Gubernur Defenitif oleh Presiden RI
Rumah Dinas Gubsu, Jumat 27 Mei 2016



PEMKAB NIAS UTARA LAKSANAKAN SOSIALISASI UU NO.14/2008



Nias Utara, Bertepatan di Kaliki Beach Gunungsitoli Jln. Yos. Sudarso Desa Saewe Gunungsitoli Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara yang difasilitasi Dinas Pemerintahan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara gelar sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dibuka secara resmi Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara, A.Md diwakili dr. Idaman Zega, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Senin (30/05/2016).

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh Satuan Kerja Pejabat Daerah (SKPD) Kabupaten Nias Utara, Staf ahli, Asisten dan staf. Narasumber pada kegiatan sosialisasi Iwan Sutarni Siregar, M.Si Kepala Seksi Pusat Informasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Dr. Idaman Zega, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada jajarannya adalah untuk memahami bagaimana penerapan pelaksanaan sesuai dengan harapan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP agar terjadinya penataan layanan informasi dan dokumentasi publik di jajarannya sesuai dengan yang diharapkan.



KEPALA SEKSI PIP DISKOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.Si
 Narasumber Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
 Aula Kabupaten Nias Utara, Selasa 31 Mei 2016





MAKNA KEBANGKITAN NASIONAL MASIH RELEVAN

Sibolga, Makna kebangkitan nasional masih relevan dimanifestasikan untuk memperkokoh komitmen dan tindakan bangsa yang bekerja nyata, mandiri dan berkarakter. Hal itu dikemukakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dalam sambutan tertulis dibacakan Kasie Komunikasi Sosial Dinas Kominfo Sumut Dra. Evi Zarnita, M.Si pada Diskusi Panel Hari Kebangkitan Nasional ke-108 di Gedung Nasional Kota Sibolga, Rabu (1/6).

Hadir antara lain Walikota Sibolga diwakili Asisten Admum Drs. Josua Hutapea pada acara dengan 100-an peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa dan utusan SKPD sc Kota Sibolga.

Dialog ini membahas berbagai fenomena aktual yang muaranya untuk meningkatkan upaya mengukir makna kebangkitan nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri dan berkarakter. Menurut Gubsu, memperingati Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari yang menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan kelahiran Organisasi Budi Utomo pada Tahun 1908.

Seiring dengan tema penyelenggara I lori Kebangkitan Nasional tahun ini, mengukir makna kebangkitan nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri dan berkarakter. Diharapkan, agar pemaknaan difokuskan pada perwujudan kerja nyata dan pembangunan yang berkarakter.

Peringatan kebangkitan nasional ke 108 tahun 2016 telah membawa pesan, yaitu keharmonisan dalam kemajemukan di atas Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 dan dalam rangka memperingati Harkitnas ke 108 tahun 2016 adalah menjadi kewajiban untuk tetap selalu menjaga nilai-nilai bangsa dengan menjadikannya pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dikatakan, negara saat ini dihadapkan dengan tantangan-tantangan bangsa, karena itu kepada semua pihak diajak memangkas hal yang berbelit-belit untuk pembangunan bangsa baik ekonomi politik dan lainnya. "Jika kita konsisten dan yakin, Peringatan Harkitnas ini akan mencambuk kita untuk membangun dan membangkitkan semangat, supaya Indonesia tetap jaya," kata Gubsu.

Gubsu juga memaparkan perkembangan informasi saat ini sangat relevan dengan kebangkitan nasional, dimana penguasaan informasi merupakan isu kontemporer yang seyogianya menentukan kemajuan suatu bangsa. Para narasumber secara umum mengemukakan informasi adalah kunci yang harus diumuskan bersama agar informasi bisa sebagai penggerak pembangunan, penyerap tenaga kerja, alat demokrasi dan pemersatu bangsa.

Narasumber mengemukakan pada era modern dan kesejagatan saat ini semangat kebangkitan nasional diarahkan untuk bangkit menguasai teknologi informasi. Indonesia harus bangkit dan lebih cerdas mengeksplotasi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan memanfaatkan teknologi informasi agar daya saing Indonesia di mata dunia lebih diperhitungkan.

KEPALA SEKSI KOMSO DISKOMINFO PROVSU Dra. EFI ZARNITA, M.Si
Narasumber Dialog Publik/Sarasehan Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016
Gedung Nasional Kota Sibolga, Rabu 1 Juni 2016



PEMENTASAN PERTUNJUKAN RAKYAT MEDIA TRADISIONAL RAKYAT DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH OLEH GROUP PETRA MATAULI PANDAN

Tapanuli Tengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional Kabupaten / Kota Tahun 2016 di Ruang Audio Visual SMA Negeri 1 Matauli Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (01/06/2016). Group Petra Matauli Pandan tampil pada acara tersebut membawakan cerita rakyat "Kerajaan Badiri".

Kegiatan itu dimulai dengan Sambutan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang dibacakan oleh Kasi Komunikasi Sosial Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara (Dra. Efi Zarnita, M.Si). Dalam Sambutan Gubsu disampaikan bahwa apresiasi masyarakat, terutama generasi muda terhadap kesenian tradisional atau pertunjukan rakyat, dewasa ini berindikasi merosot.

Dikhawatirkan dalam waktu satu dasawarsa lagi, kesenian tradisional akan kehilangan, bukan hanya kehilangan penonton, melainkan juga pewaris aktifitasnya. Padahal, seni pertunjukan tradisional memiliki fungsi strategis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, diantaranya berfungsi sebagai alat pendidikan masyarakat, media perjuangan, media kritik sosial, media pembangunan, media komunikasi, dan media informasi lainnya.

Selanjutnya, dalam sambutan Gubsu disampaikan bahwa Pemerintah dan pemangku amanah kesenian tradisional harus terus melakukan inovasi dan terobosan agar jenis seni pertunjukan ini tetap mampu bangkit dan merebut kembali hati publik dengan selera publik pada zamannya, sekaligus mampu merebut pasar tanpa menghilangkan nilai – nilai tradisionalnya. Namun dalam inovasi dan pengembangannya, kata kuncinya berada pada para penman dan pewaris aktif kesenian tradisional itu sendiri.

Karenanya, diperlukan seniman pertunjukan rakyat yang jenius dan memiliki sistem jaringan dalam komunikasi modern yang mampu kompetitif. Kami gembira para seniman di Sumatera Utara sangat menyadari hal ini sehingga terpenggil untuk menghidupkan kembali komponen – komponen seniman media tradisional pada masing – masing daerahnya dengan tekad "Membangkitkan Batang Terendam".

Untuk menyahut tekad tersebut, kami melalui Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah dan Group Pertunjukan Rakyat Matauli Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar pementasan pertunjukan rakyat media tradisional di SMA Negeri 1 Plus Matauli Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ini, kata Gubsu diakhir sambutannya.

Sambutan Bupati Tapanuli Tengah (H. Sukran Jamilan Tanjung, SE, MM) dibacakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah (Erman Syahrin Lubis, S.Sos, M.AP).

Dalam sambutannya Bupati Tapanuli Tengah mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara menghunjuk Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyelenggaraan pementasan pertunjukan rakyat media tradisional kabupaten / kota tahun 2016 dengan menampilkan Group Petra Matauli Pandan, yang anggotanya terdiri atas siswa-siswi SMA Negeri 1 Matauli Pandan untuk menyampaikan suatu pesan, yang merupakan tema Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari pelaksanaan kegiatan ini, yang berhubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tahun 2016, yaitu "Mengukir makna kebangkitan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, nyata, mandiri, dan berkarakter".

Selanjutnya, dalam sambutan Bupati Tapanuli Tengah disampaikan bahwa tantangan dan ancaman yang melingkupi generasi muda saat ini semakin kompleks, selain dituntut memiliki kualitas kemampuan dan keahlian yang handal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau pun dunia kerja, juga ada ancaman bahaya narkoba, paham – paham radikal seperti komunisme dan teroris, berbagai tindakan kejahatan, dan lain sebagainya.

Adanya berbagai kegiatan positif dalam mengembangkan kemampuan diri dan kelompok untuk meningkatkan keimanan kepada tuhan yang maha esa, daya saling, kemampuan dan keahlian, etika moral, budaya luhur dan karakter bangsa dengan landasan nilai – nilai luhur dan pandangan hidup bangsa, yaitu pancasila patut kita jaga dan kembangkan.

Diakhir sambutannya Bupati Tapanuli Tengah menyatakan bahwa pertunjukan saat ini, sebagai amanah dari Pemprov Sumatera Utara akan kita tindak lanjut melalui pengenalan Petra ke sekolah – sekolah lainnya, mulai dari wilayah Pandan dan sekitarnya hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ke depan, sinergitas dan koordinasi lintas sektor mutlak kita perlukan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga nantinya akan memiliki dampak positif yang berhasil guna.

Para peserta undangan, yang terdiri atas SKPD di lingkungan Pemkab Tapanuli Tengah, para pegiat budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah, guru dan siswa perwakilan SMA, SMK dan SMP di Kecamatan Pandan, Sarudik, Tukka dan Badiri, media massa / insan pers, dan undangan lainnya menyaksikan pagelaran Group Pentas Tradisional Matauli Pandan dengan judul Kerajaan Badiri, memadukan musik, tarian dan fragmen berupa pesan yang akan disampaikan, yang mendapat apresiasi dari para undangan acara tersebut.



KEPALA SEKSI KOMSOS DISKOMINFO PROVSU Dra. EFI ZARNITA, M.Si
Membuka Pementasan Pertunjukan Rakyat (Petra) Kabupaten Tapanuli Tengah
Aula SMAN 1 (Plus) Matauli, Rabu 1 Juni 2016

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum

Menghadiri Jamuan Makan Malam Bersama Rombongan Roadshow Membangun Tol Listrik Menuju Provinsi Sumatera Utara Terang
Rumah Dinas Gubernur, Rabu 1 Juni 2016



TEMU RAMAH DENGAN JAJARAN PLN, GUBSU INSTRUKSIKAN KDH DUKUNG PROGRAM TOL LISTRIK UNTUK SUMATERA TERANG

Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si menginstruksikan kepada Kepala Daerah (KdH) di 33 Kabupaten/Kota untuk mendukung Program Tol Listrik Untuk Sumut Terang. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi keluar dari persoalan krisis listrik di Sumut.

Instruksi tersebut disampaikan Gubsu dalam acara ramah-tamah dan jamuan makan malam dalam rangka kegiatan membangun tol listrik menuju Sumut terang di rumah dinas gubernur Sumut (Gubernuran) Jl Sudirman Medan, Rabu (1/6/2016) malam.

Hadir dalam acara itu Direktur Bisnis PT PLN (Persero) Regional Sumatera Amir Rosidin, Kepala Papold Sumut Irjen Pol Raden Budi Winarso, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut M. Yusni, Kasdam I/BB, Kepala BIN Sumut Brigjen TNI Sungkono, Kabid Pam Olvit Poldasu Kombes Pol Hery Subianshauri, Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin, dan sejumlah SKPD Provsu dan pejabat PLN lainnya.

Turut hadir Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, Walikota Binjai H. M. Idaham, Bupati Sergai Soekirman, Walikota Tebing Tinggi Umar Z Hasibuan, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Simalungun JR Saragih, Walikota Padang Sidimpuan Andar Amin Harahap, Pj Walikota Pematang Siantar Jumsadi Damanik,

Dalam kesempatan itu, Gubsu mengatakan, persoalan listrik menjadi perhatian serius pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dalam rangka mendorong percepatan terwujudnya program Nawa Cita. Keseriusan tersebut mendasari lahirnya Peps No 4 Tahun 2015 yang menginstruksikan penyiapan daya listrik 35.000 Megawatt (MW). "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut antusias tol listrik karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi," sebut Gubsu.

Gubsu mengatakan, populasi penduduk Sumut mencapai 14 juta jiwa, didukung dengan potensi masyarakat yang majemuk yang dilandasi komitmen menjaga suasana kondusif, merupakan modal dasar dalam memacu pembangunan. Tetapi semua kelebihan itu akan pincang tanpa ketersediaan energy listrik yang mencukupi. "Salah satu kendala yang menghambat pertumbuhan bidang investasi di Sumut akibat ketersediaan pasokan listrik. Tiap investor yang ingin menanamkan investasinya di Sumut, selalu bertanya tentang ketersediaan listrik," tambah Gubsu.

Gubsu menyebutkan, pasokan listrik Sumut terbilang surplus mencapai 111 MW. Namun kelebihan energi ini memastikan wilayah Sumut memiliki energi melebihi rata-rata kebutuhan pemakaian harian para pelanggan listrik.

Surplus listrik ini patut dibanggakan, karena berimbas pada keberlangsungan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Sumut yang mencapai 1.171.291 pelanggan. Bahkan cadangan energy listrik Sumut saat ini telah mendekati 14 persen atau total pasokan listrik sebanyak 1.970 MW.

Tol Listrik, sebut Gubsu, akan mendukung percepatan pembangunan, karena energy listrik merupakan salah satu pondasi infrastruktur dasar yang yang terpenuhi. "Tol Listrik nantinya kita harapkan akan mampu menyuplai kebutuhan masyarakat Sumut mulai dari Sidimpuan hingga Kota Binjai," harap Gubsu.

Sementara Direktur Bisnis PT PLN Regional Sumatera, Amir Rosidin mengatakan, pengembangan Ketenagalistrikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari belum sesuainya harapan Rasio elektrifikasi di Indonesia yang masih sebesar 84 persen dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 52.000 MW.

Guna mendukung suksesnya pembangunan kelistrikan di Indonesia Bapak Presiden telah mengeluarkan Perpres No.4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pemerintah sudah menginstruksikan instansi-instansi terkait untuk bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-152/A/GA/10/2015 tgl 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Imbang adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Langkah awal apresiasi PLN ialah pembentukan Keputusan Direksi Tim Imbang atau Pelaksana Pendamping yang bersinergi dengan Tim TP4P, melalui SK DIR No. 0219/DIR/2015 tanggal 30 November 2015 tentang pembentukan Tim Imbang Pengawal dan Pengaman PT PLN (Persero) dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Tim Imbang P4IK). "Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan butuh bantuan banyak pihak dimana seluruh elemen harus saling bahu membahu," ujar Rosidin.

Salah satu kendala pembangunan 275 kV Sumatera adalah pembebasan tanah dan kompensasi RoW. Untuk mengatasi hambatan tersebut sangat diharapkan dukungan dan bantuan dari seluruh stakeholder terkait, yaitu Pemprov Sumut, Pemkab dan Pemko terkait, TNI, Polri, Kejati, BIN, Instansi Kementerian/ Lembaga terkait serta peran serta masyarakat khususnya kerelaan/keikhlasan pemilik lahan untuk melepaskan tanahnya untuk tapak tower dan keikhlasan untuk dilalui transmisi (RoW), sehingga realisasi pembangunan 275 kV Sumatera menjadi solusi defisit listrik di Sumut, menjadikan Sumut terang dan dapat menjadi penggerak sosial-ekonomi masyarakat.

Tol Listrik Untuk Sumut Terang, sebut Rosidin, merupakan upaya meningkatkan kuantitas, mutu dan keandalan system kelistrikan di Sumut. Pemerintah melalui PT PLN (Persero) UIP II telah membangun Gardu Induk (GI) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

BULAN RAMADHAN PENGHULU SEGALA BULAN

Medan, Bulan suci Ramadhan merupakan bulan yang sangat mulia sebagai penghulu segala bulan. Hal ini disampaikan Ketua MUI Sumut Prof. H. Abdullah Syah, MA pada acara Coffee Morning menyambut bulan suci Ramadhan 1437 H yang diselenggarakan di Aula Transparansi Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (2/6).

Ketua MUI menjelaskan yang dimaksud penghulu segala bulan dimana pada bulan suci ramadhan pintu neraka di tutup dan pintu-pintu syurga di buka, syaitan-syaitan di belenggu serta terdapat shalat sunah tarawih yang tidak ada di bulan yang lain. "Kelebihan ramadhan yaitu di siang hari kita puasa dan di malam hari shalat tarawih dan witr, menghapus dosa-dosa dari 11 bulan yang lalu, terdapat malam lailatul qadar dimana malam tersebut lebih baik dari malam 1000 bulan, serta pintu neraka di tutup dan pintu syurga di buka", ujar ketua MUI.

Ketua MUI menyarankan untuk berniat diawal bulan ramadhan, perbanyak sedekah di bulan ramadhan dan memberikan makanan berbuka untuk yang berpuasa. Sedangkan hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum bulan ramadhan yaitu membayar dan menunaikan hutang serta maaf memaafkan.

Sementara itu, Ketua FKUB DR. H. Maratua Simanjuntak menyampaikan bahwa pemuka agama mempunyai fungsi yang informatif, konsultatif dan advokatif. Dimana fungsi tersebut untuk menciptakan ketentraman, kerukunan dan pemersatu antar umat beragama. "Puncak kerukunan umat beragama yang dimaksud dapat dengan sadar dan sabar melihat agama lain menjalankan ibadahnya." Ujar ketua FKUB. Ketua FKUB berharap pada bulan ramadhan tahun ini umat beragama dapat rukun, damai dan tentram.

Acara tersebut di buka oleh Pih. Dinas Kominfo Provsu H. M. Ayub, SE dan dihadiri Kabid. PUKH M. Rosmidar, SAG, Kasie Hubungan Lembaga dan Kemitraan Abdul Aziz, S.Sos, M.AP, Kasubbag Umum Lily Maulina Lubis, SS, Kasubbag Program Malderhana Nasution, SP, serta para mahasiswa PTN/PTS di Medan.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Menghadiri *Coffee Morning* dalam rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H
Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Kamis 2 Juni 2016





GUBSU Ir. H. TENGKU ERY NURADI, M.Si

Pembuatan Video Ucapan Selamat Berbuka Puasa dan Selamat Hari Raya Idul Fitri
Rumah Dinas Gubernur, Jumat 3 Juni 2016



WAKIL BUPATI PALAS MINTA SKPD SEGERA BENTUK PPID

Padang Lawas, Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas (Palas) drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) supaya segera mengusulkan nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar dapat melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik. "PPID itu adalah gerbang bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi secara transparan," ujar Wakil Bupati pada Sosialisasi PPID diselenggarakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Padang Lawas, Jumat (3/6/2016) di Aula Gedung Nasional Sibuhuan.

Tentunya tugas PPID memberikan informasi kepada masyarakat, pers dan LSM yang membutuhkan informasi dari SKPD. "Di era sekarang tidak ada yang disembunyikan, semuanya harus transparan sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sementara Kadishubkominfo Pemkab Palas Ali Irfan Hasibuan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber Iwan Sutani Siregar yang sengaja diundang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk mendistribusikan ilmunya kepada peserta.

Meski Kadis sempat mengesalkan minimnya kehadiran dari seluruh Pimpinan SKPD yang sebelumnya telah diundangnya untuk hadir. "Semoga kegiatan ini dapat membawa hikmah bagi kita semua, dan saya harapkan kepada seluruh peserta agar serius mengikuti kegiatan ini. Karena saya yakin dari seluruh yang hadir pada acara ini mampu memberikan informasi yang jelas dan melayani seluruh masyarakat dengan baik sesuai dengan Undang-Undang KIP nomor 14 Tahun 2008," ujarnya.

Pada kesempatan itu dia berharap bisa menyampaikan titip salam saya kepada pimpinan masing-masing peserta. "Saya tahu ketidakhadiran pimpinan dari saudara-saudara. Walaupun belum sempat memberitahukan alasan ketidakhadirannya pada acara kita ini, saya yakin itu dikarenakan ada sesuatu hal yang sangat penting serta harus dikerjakannya demi kemajuan pembangunan Kabupaten Palas yang sama-sama kita cintai ini," sebut Kadishubkominfo.





KEPALA SEKSI PIP DISKOMINFO PROVSU IWAN SUTANI SIREGAR, S.STP, M.Si
Narasumber Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Padang Lawas
Gedung Nasional Sibuhuan, Jumat 3 Juni 2016

SEKRETARIS DISKOMINFO H. M. AYUB, SE

Menghadiri Jamuan Makan Malam Bersama Peserta Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafiz-Hafizah (IPQAH) MUI se-Sumatera Utara
Rumah Dinas Gubernur, Jumat 3 Juni 2016







KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sumut
Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Sabtu 4 Juni 2016

RUPS TAHUN BUKU 2015 DAN RUPS LUAR BIASA BANK SUMUT, GUBSU DORONG BANK SUMUT PERBAIKI KINERJA DAN LAKUKAN EKSPANSI

Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) PT Bank Sumut segera melakukan ekspansi dengan membuka kantor cabang di sejumlah provinsi guna mengembangkan market. Harapan tersebut dikemukakan Gubsu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2015 sekaligus RUPS Luar Biasa Bank Sumut di Ballroom Bank Sumut, lantai 10, Jl Imam Bonjol Medan, Sabtu (4/6/2016).

Hadir dalam acara tersebut Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumatera Ahmad Soekro Tratmono, dewan komisaris PT Bank Sumut, jajaran direktur dan sejumlah bupati dan walikota selaku pemegang saham, pelaku perbankan dan undangan.

Dalam kesempatan itu, Gubsu menegaskan, kinerja Bank Sumut belum maksimal berdasarkan hasil RUPS Tahun Buku 2015. Peningkatan asset Bank Sumut hanya 3,15 persen dengan dana yang berhasil dihimpun hanya 2,71 persen. Angka tersebut, sebut Gubsu, jauh di bawah kinerja tahun 2013 lalu yang sukses menghimpun laba mencapai Rp 531 miliar. "Tahun 2013 itu, bahkan Bank Sumut tidak memiliki Direktur Utama. Tetapi saat ini, saat Bank Sumut telah memiliki Direktur Utama, kinerja Bank Sumut tidak maksimal," sebut Gubsu.

Kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) Bank Sumut tahun 2015 juga masih diatas 5 persen. Ini NPL yang tidak diperbolehkan. Saya berharap NPL Bank Sumut di bawah 5 persen. Untuk itu, Bank Sumut harus memaksimalkan strategi penagihan. Jangan payout karena payout akan mengurangi laba," harap Gubsu.

Gubsu berharap, Bank Sumut meningkatkan kinerjanya dengan menelurkan berbagai program strategis, salah satunya melakukan ekspansi membangun kantor cabang di sejumlah provinsi. "Tidak ada salahnya kita belajar dari Bank Jabar yang kini telah memiliki kantor cabang di banyak provinsi. Bahkan telah membangun sistem program untuk melayani pembayaran STNK kendaraan. Sementara Bank Sumut masih memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Itu satu-satunya saat ini," ujar Gubsu.

Strategi lain, sebut Gubsu, meningkatkan penambahan besaran saham dari Kabupaten/Kota di Sumut. Selain itu, Kabupaten/Kota juga dapat menempatkan dana yang belum digunakan guna meningkatkan market Bank Sumut. "Saya juga mengimbau Bank Sumut merangkul Kepala Daerah, bupati dan walikota untuk meningkatkan besaran sahamnya di Bank Sumut. Bisa juga dengan menempatkan dana belum terpakai milik Pemkab dan Pemko. Saya yakin investasi modal akan memberikan keuntungan," sebut Gubsu.

Usai menggelar RUPS Tahun Buku 2015, kemudian dilanjutkan RUPS Luar Biasa. Hasil RUPS Luar Biasa menetapkan Hendra Arbie menjadi komisaris, mengisi kekosongan jabatan komisaris sebelumnya setelah ditinggalkan Dzaili Anwar. Hendra Arbie diharapkan dapat bersinergi dengan dua komisaris lainnya Riza Pahlevi dan Batara Kusuma. "Dengan lengkapnya komisaris, maka kinerja Bank Sumut diharapkan semakin membaik ke depannya," harap Gubsu.

Dalam kesempatan itu, Gubsu juga menyatakan, telah mengajukan dua nama untuk calon Komisaris Utama Bank Sumut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Ada dua nama yang diusulkan. Tinggal menunggu hasil dari OJK," sebut Gubsu singkat. Sementara Kepala OJK Kantor Regional 5 Sumatera, Ahmad Soekro Tratmono membenarkan tentang pengusulan dua nama untuk dipilih menjabat Komisaris Utama PT Bank Sumut. "PSP Bank Sumut sudah mengajukan dua nama untuk calon Komisaris Utama ke OJK Pusat. Saat ini masih dalam proses. Kalau sudah ada, pasti ada tembusan ke OJK Sumatera," sebut Soekro.

Soekro juga mengatakan, sebelum ditetapkan menjadi komisaris Bank Sumut, Hendra Arbie telah melewati hasil uji OJK. "Kalau sudah ditetapkan PSP Bank Sumut, maka itu artinya sudah lolos dari hasil uji OJK," ujar Soekro.

DINAS KOMINFO PROVSU SELENGGARAKAN PENGAJIAN RUTIN BULAN RAMADHA



Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan pengajian rutin selama bulan Suci Ramadhan 1437 H di Mushola Babut At Taubah Dinas Kominfo Provsu, Selasa (7/6). Tausiyah dalam pengajian tersebut diisi oleh Al-Ustad Kasman, Lc, MA dan dihadiri pejabat eselon IV dan Karyawan/Karyawati Dinas Kominfo Provsu.

PENGAJIAN RAMADHAN

Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Musholla Babut Taubah Diskominfo Provsu, Selasa 7 Juni 2016



BUKA PUASA PEMPROV SUMUT BERSAMA JAJARAN FKPD, GUBSU HARAPKAN PUASA RAMADHAN TINGKATKAN TALI SILATURRAHMI

Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengajak seluruh eksekutif, legislatif dan yudikatif meningkatkan kebersamaan dan sinergitas dalam membangun Sumut yang lebih maju.

Ajakan tersebut digaungkan Gubsu dalam acara berbuka puasa bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut, jajaran DPRD, Bupati/Wali Kota, Ormas Islam, SKPD Sumut, instansi terkait dan alim ulama di rumah dinas Gubernur Sumut (Gubernuran), Jl Sudirman Medan, Rabu (8/6/2016).

Hadir dalam acara tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk Pusung, Kapoldasu Irjen Pol Raden Budi Winarso, Kajatisu Bambang Sugeng Rukmono, Walikota Medan Dzulmi Eldin, pimpinan DPRD Sumut, tokoh masyarakat, alim ulama dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Gubsu menyatakan, eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh lapisan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling dukung. Sinergitas dapat diawali dengan bersilaturahmi. "Silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting. Bulan suci Ramadhan ini, intensitas silaturahmi tentunya meningkat. Silaturahmi membuat kita jadi lebih sering bertemu seperti acara berbuka puasa ini, taraweh berjamaah dan sebagainya," sebut Gubsu.



Gubsu juga mengatakan, budaya berkumpul memberikan manfaat diantaranya dengan saling memberi masukan dan sumbang saran, terkait upaya yang dapat dilakukan dalam membangun Sumut yang lebih baik.

Dengan eratnya tali silaturahmi yang senantiasa kita lakukan, sebut Gubsu, diharapkan mendapat ridho Allah SWT. "Silaturahmi juga dapat menambah rezeki dan umur panjang," sebut Gubsu.

Hadir sebagai penceramah Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Dalam tausyiahnya, Ustadz Syamsul mengajak seluruh undangan untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadhan, bulan berkah penuh ampunan. "Mari kita tingkatkan amal ibadah, amalan dan keakwaan kita kepada Allah di bulan suci Ramadhan ini," ajak Syamsul.

Usai tausyiah, seluruh undangan kemudian berbuka puasa bersama. Kemudian dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Kemudian makan bersama dan sholat tarawih berjamaah di ruang utama rumah dinas Gubernur Sumut, Jl Sudirman Medan.

KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH. M.Hum

Menghadiri Berbuka Puasa Bersama Forkopimda Provsu, Bupati dan Walikota, Alim Ulama se-Sumatera Utara,
Ormas Keagamaan Islam, Pimpinan SKPD dan Instansi Terkait
Rumah Dinas Gubernur, Rabu 8 Juni 2016



PENGELOLA TATA NASKAH ELEKTRONIK WUJUDKAN GOOD GOVERNMENT



Medan, Pih. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara H. M. Ayub, SH membuka sosialisasi pelaksanaan peraturan kepala BKN No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS telah memberikan peluang bagi organisasi atau lembaga, perorangan untuk mengelola arsip atau dokumen secara elektronik berlangsung di aula transparansi Dinas Kominfo Sumut Kamis (9/6).

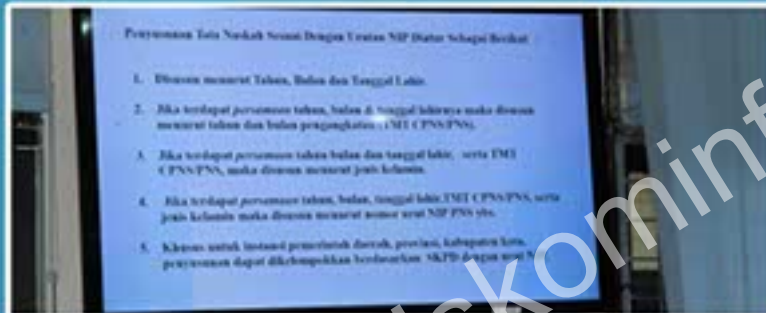
Dalam sambutannya M. Ayub mengatakan bahwa Birokrasi Pemerintahan selalu dihadapkan pada pekerjaan yang selalu berkaitan dengan naskah dinas, surat serta pengarsipan surat dan lainnya dalam upaya mendukung pelayanan publik yang optimal. Untuk itu diharapkan kedepannya perlu dilakukan penyeragaman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan secara elektronik dalam mendukung program Good Government.

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Viktor Saing, S. Sos M.Si selaku narasumber mengatakan setiap aparatur sipil negara harus memiliki integritas, profesionalitas yang tinggi serta mampu melakukan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. "Peningkatkan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah daerah yang mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Ucapnya. Hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Struktural dan Fungsional serta staf di Lingkungan Dinas Kominfo Provsu.

SEKRETARIS DINAS KOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Membuka Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Perorangan untuk Mengelola Arsip atau Dokumen secara Elektronik

Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu, Kamis 9 Juni 2016



KEMENTERIAN KOMINFO SOSIALISASI PROGRAM 1 JUTA DOMAIN

Medan, Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Pemerintah telah mencanangkan Penggunaan satu juta domain gratis yang menyasar kepada pelaku UKM, sekolah, desa, dan komunitas. Program yang dinamai "Indonesia Go Online" ini akan dilaksanakan selama 3 tahun dan berakhir di tahun 2018, hal tersebut dikatakan Kasubdit Tata Kelola e-Business Direktorat e-Business Ditjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo RI Lukman, BE pada acara Sosialisasi Satu Juta Domain "Indonesia Go Online" di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Senin (13/6).

Dalam program ini pemerintah akan memberikan 1 Domain dan Hosting gratis bagi calon registran kemudian pendampingan pengoperasian selama 1 tahun, dalam prosesnya akan diberikan pelatihan dalam pembuatan media promosi berupa website profil, website toko online dengan menggunakan CMS khusus yang telah di sediakan oleh Kementerian Kominfo RI dan di dalamnya terdapat berbagai macam template website yang bisa di pilih sesuai ide usaha.

"Program ini dicanangkan khusus untuk meningkatkan penggunaan domain .id oleh masyarakat Indonesia, khususnya UKM. Penggunaan situs web dengan domain .id ini juga diharapkan dapat membantu UKM memperluas bisnisnya. Apalagi, banyak UKM di Indonesia sudah memiliki produk berkualitas dan bagus", Ujar Lukman.

Sementara itu Kadis Kominfo Provsu Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum mengapresiasi program Satu juta domain ini guna mendukung agar para pelaku usaha mikro dapat bersaing dan mempromosikan hasil produknya melalui media internet, selain itu juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Sosialisasi ini dihadiri Kabid Aplikasi dan Telematika Drs. E. Sunaryah, M.Si, Kepala Seksi E-Governance dan Aplikasi M. Alfian Jauhari, S.Hut, beserta beberapa Staf dilingkungan Diskominfo Provsu.





KADIS KOMINFO PROVSU Drs. JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menerima Audiensi Tim Sosialisasi 1 Juta Domain "Indonesia Go Online" Kementerian Kominfo
Ruang Rapat Kadis Kominfo Provsu, Senin 13 Juni 2016





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
 Menerima Audiensi Media Online Focussumut.com
 Ruang Kerja Sekdis Kominfo, Selasa 14 Juni 2016





SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
 Menerima Audiensi Media Detektif Monitor Medan
 Ruang Kerja Sekdis Kominfo, Selasa 14 Juni 2016

SAFARI RAMADHAN PEMPROV SUMUT DI ASAHAN *2016, ALOKASI APBD PROVSU BANGUN INFRASTRUKTUR DI ASAHAN RP 62 MILYAR

Kisaran, Alokasi APBD Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan pada tahun anggaran 2016 mencapai Rp 62,063 milyar dan pada tahun 2017 rencananya meningkat dua kali lipat menjadi Rp 134,321 milyar. Anggaran tersebut dialokasikan melalui anggaran Dinas Bina Marga, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

Hal itu diungkapkan Sekda Provsu H. Hasban Ritonga, SH saat memimpin pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 1437 H di Masjid Agung Ahmad Bakrie Kisaran, Kabupaten Asahan, Rabu (15/6) malam. Kunjungan Safari Ramadhan dimanfaatkan Pemprov Sumut untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang berbagai program pembangunan pusat maupun provinsi.

Dalam APBD tahun 2016, Pemprov Sumut mengalokasikan Rp 47,543 milyar pada Dinas Binamarga, Rp 12,12 milyar di Dinas PSDA dan Rp 2,4 milyar di Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

Sedangkan untuk alokasi APBN, pada tahun 2016 ini Kabupaten Asahan mendapatkan porsi alokasi sebesar Rp 65,425 m untuk belanja infrastruktur di bidang Binamarga senilai Rp 58,743 milyar dan Perumahan dan Permukiman senilai Rp 6,68 milyar.

Sekda Provsu menjelaskan alokasi untuk pembangunan infrastruktur baik menggunakan dana APBN dan APBD pada tahun 2017 rencananya meningkat yaitu senilai Rp 134,321 milyar pada APBD Provsu dan Rp 244,435 milyar alokasi APBN. Total alokasi APBD Provsu dan APBN untuk pembangunan infrastruktur di Asahan pada tahun 2016 mencapai 127,489 milyar, maka pada tahun 2017 jumlahnya meningkat hampir tiga kali lipat menjadi Rp 378,757 milyar.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengatakan proyek pembangunan infrastruktur yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2016 adalah untuk pembebasan lahan seluas 72 ha di Asahan dan 18 ha di Tanjung Balai dalam rangka pembangunan pengendalian banjir sungai Asahan.

Hal yang sudah dibebaskan, akan dibangun pengendalian banjir dengan nilai kontrak pelaksanaan fisik nantinya mencapai Rp 700 milyar yang dibagi dalam 3 tahap pekerjaan pengendalian banjir Sei Asahan. Selain itu, ada rencana pembebasan pembangunan suplesi dari Sungai Silau ke Sungai Bunut yang saat ini dalam proses izin lokasi tanah dari Gubsu.



Dalam kesempatan itu, Hasban menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Asahan dan Tanjungbalai untuk ikut mendukung program pembangunan terutama soal pembebasan lahan. "Karena tujuannya adalah untuk kepentingan banyak orang, maka kami harap baik pemerintah kabupaten maupun warga masyarakat ikut mendukung sehingga pembangunan pengendalian banjir Sei Asahan bisa dilaksanakan dengan baik," kata Sekda Provsu.

Acara Safari Ramadhan berlangsung di Masjid Agung Ahmad Bakrie dilaksanakan usai sholat Isa berjamaah yang diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh Ahmad Muhazir dan tausiyah agama yang disampaikan H. Nasrun Zakaria.

Sekda menyerahkan secara simbolis tali asih dan bingkisan kepada 100 anak yatim/piatu masing-masing dan 100 ulama serta bantuan kepada badan kenaziran masjid agung H. Ahmad Bakrie uang tunai Rp 15 juta. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Asahan Surya, Bsc, alim ulama, pejabat di lingkungan Pemda Kisaran.

Sedangkan Sekda didampingi Kepala Dinas PSDA Dinsyah Sitompul, Pendapatan Rajali S.Sos, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Baharuddin Siagian, Kepala Badan Ketahanan Pangan Suyono, Kepala Biro Perlengkapan Syafrudin Nasution, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Ir. Eddy Salim, M.Si, Pl. Kadis Kominfo M Ayub, Staf Ahli Gubsu Robertson, Staf Ahli Bidang Hukum Ferlin Nainggolan, Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman Binsar Situmorang dan Kepala Bakorluh Bonar Sirait.



SEKRETARIS DISKOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE
Buka Puasa Bersama dalam rangka Safari Ramadhan 1437 H di Kab. Asahan
Mesjid Agung H. Achmad Bakri Kab. Asahan, Rabu 15 Juni 2016

KPK SERAHKAN KE PEMPROV SUMUT 8 PROGRAM APLIKASI E-GOVERNMENT SURABAYA

Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan delapan source code sistem e-government Kota Surabaya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Sumut. Penyerahan dilakukan Koordinator Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Wardiana kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga di Kantor Gubsu, Kamis (16/6).

Hadir dalam kesempatan itu Ketua tim pendampingan KPK di Sumut Adlinsyah Nasution dan Tomi Murtomo, Ketua Tim Rencana Aksi Pemprovsum yang juga menjabat Assisten Administrasi Umum dan Aset H. M. Fitriyus para Kepala SKPD jajaran Pemprov Sumut.

Delapan source code e-government dimaksud yaitu source code program aplikasi e-musrenbang, e-budgeting, e-project planning, e-delivery, e-payment, e-controlling, e-performance dan source code program aplikasi e-SDM.

Seperti diketahui, KPK telah menginisiasi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditindaklanjuti oleh Pemprovsum dalam bentuk Rencana Aksi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/291/KPTS/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprovsum. Salah satu dari rencana aksi tersebut adalah implementasi sistem aplikasi elektronik yang mengacu kepada sistem e-gov milik Pemko Surabaya.

"Terimakasih kepada KPK yang tidak lelah melakukan asistensi kepada kami. Source code aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi Pemprov Sumut untuk membangun sistem e-government yang baik sebagai bentuk komitmen pemprovsum hadirkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik," ujar Sekda Provsu.

Menurut Sekda Provsu, Gubsu sudah menekankan agar SKPD terkait dapat menerapkan aplikasi dengan berbagai penyesuaian yang ada. "Harapan kita kepada SKPD tidak lagi berhenti setengah dalam menyikapi dan menerapkan aplikasi IT. Walaupun tentu harus melakukan penyesuaian dan improvisasi," katanya.

Wawan Wardiana mengatakan Sumatera Utara merupakan Provinsi pertama yang mendapatkan source code aplikasi dari KPK yang berasal dari Pemko Surabaya. Karena itu, pihaknya berharap aplikasi e- government dimaksud sudah dapat berjalan baik di Pemprov Sumut satu tahun dari sekarang. "Karena provinsi pertama, espektasi kami juga tinggi. Kalau surabaya butuh 3 tahun mengembangkannya, Sumut kami harap kalau setahun sudah bisa running well mulai e-musrenbang, e-budgeting, dan lain-lain," kata dia.

Dia mengatakan agar Pemprov Sumut sebaik-baiknya menggunakan delapan source code aplikasi yang sudah dikembangkan Pemko Surabaya selama 3 tahun membangun e-government di Surabaya. "Mereka serahkan sukarela, kalau dihitung dengan uang sangat besar dibandingkan usaha pengembangan selama 3 tahun yang mereka lakukan. Mohon bisa dimanfaatkan dengan baik," katanya.

SEKRETARIS DINAS KOMINFO PROVSU H. M. AYUB, SE

Menghadiri Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan/Penggunaan *Source Code* e-Government Bekerjasama dengan Pemko Surabaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Implementasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sumut
Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Sumut, Kamis 16 Juni 2016



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVSU SOSIALISASI SYARIAT ZAKAT

Medan, Dalam menjalankan bulan suci Ramadhan yang penuh berkah, rahmad, kasih sayang dan amal ibadah yang dilipatgandakan, maka di penghujung Ramadhan ada kewajiban yang harus dilakukan yaitu membayar zakat sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial dan membentuk hubungan antar manusia yang baik.

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Sebagai upaya untuk mengetahui zakat, baik itu mengenai haul, nishab dan jenis zakat maka Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi syariat zakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Diskominfo Provsu), di Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Jumat (17/6).

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai hasil amandemen dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Diantara perubahan yang terjadi adalah perubahan nama lembaga, Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dr. H. Buchori Nasution selaku narasumber mengatakan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: "Islam dibangun diatas lima dasar" salah satunya membayar zakat, seperti zakat harta emas dan perak apabila telah mencapai satu haul. Banyaknya nishab (harta minimal) emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram.

Adapun besaran zakat emas dan zakat perak ialah 2,5 %. Kalau harta emas dan perak belum cukup haul dan nishab untuk dikeluarkan zakatnya maka infaqkanlah sebagian. Selain itu bersedekahlah karna orang yang bersedekah akan menutupi kemarahan Allah SWT dan menjaga dari segala bencana/kejahatan.

Sosialisasi layanan kemudhar berzakat melalui BAZNAS merupakan implementasi Inpres No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Paparan zakat berlanjut pada sesi tanya jawab. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah tentang batas waktu pembayaran zakat fitrah. Menurut Dr. H. Buchori Nasution, "batas pembayaran zakat fitrah ialah mulai dari awal Ramadhan sampai naik khatib ke atas mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar maka zakat itu menjadi zakat sedeqah (zakat biasa), zakat fitrah hukum wajibnya dibayarkan pada malam hari raya idul fitri." Hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Struktural dan staf di Lingkungan Diskominfo Provsu.



KASUBAG UMUM DISKOMINFO PROVSU LILY MAULINA LUBIS, SS
Menghadiri Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumut
Aula Transparansi Diskominfo Provsu, Jumat 17 Juni 2016





KADIS KOMINFO PROVSU JUMSADI DAMANIK, SH, M.Hum
Menerima Source Code e-Government dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI
Ruang Rapat Sekda Provsu, Kamis 23 Juni 2016



TERIMA AUDIENSI DUBES RRT, GUBSU AJAK INVESTOR RRT JALIN KERJASAMA BERBAGAI BIDANG

Medan. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si mengajak investor Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menanamkan investasi dan kerjasama bidang pembangunan pembangkit listrik, infrastruktur transportasi, industri perkebunan dan pariwisata di Sumut.

Tawaran kerjasama itu disampaikan Gubsu saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Mr Xie Feng didampingi Konsulat Jenderal (Konjen) RRT Zhu Hong Hai di ruang kerjanya, kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Selasa (28/6/2016).

Hadir dalam rombongan Dubes RRT, isteri Dubes RRT Wang Dan, perwakilan Kedubes China Wong Shikun, Li Jibin, Hu Yang dan perwakilan Konjen China Chang Xiao Zhu dan Niu Yujia. Sementara Gubernur Sumut didampingi Kepala Badan (Kaban) Penanaman Modal dan Promosi Sumut Ir Purnama Dewi, Kepala Dinas (Kadis) Perindag Sumut Ir. Alwin Sitorus dan Kepala Bappeda Sumut Dr Arsyad Lubis.

Dalam kesempatan itu, Gubsu memaparkan sejumlah potensi yang dimiliki Sumut, diantaranya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke di Kabupaten Simalungun yang menjadi pusat industri pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya. Begitu juga pembangunan jalur kereta api dari KEK Sei Mangke ke Pelabuhan Kuala Tanjung, pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional. "Kami mempersilahkan investor RRT untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Sumut, ajak Gubsu.

Selama ini, sebut Gubsu, beberapa investor RRT telah berinvestasi di bidang energi seperti pembangkit listrik di Belawan dan Pangkaleneh. Demikian juga pada bidang infrastruktur yakni pembangunan jalan tol Kuala Namu. Namun,

"Kita mendapat laporan, kualitas dan hasil kerja investor RRT kurang memuaskan karena terkendala beberapa faktor. Kita berharap, investor RRT yang sedang bekerja di Sumatera Utara tetap menjaga kualitas kinerja demi menjaga nama baik RRT di Indonesia," harap Gubsu.

Gubsu juga mengatakan pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumut mencapai 1,5 kali pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kerjasama bidang energi masih terbuka lebar di Sumut. "Harini kebutuhan dihasilkan 2.000 Megawatt untuk Sumut, maka tahun depan ada peningkatan butuh hingga 300 MW. "Aya yakin potensi investasi di bidang energi sangat baik di Sumut dan RRT sangat berpengalaman pada bidang ini," ajak Gubsu.

Dalam kesempatan itu, Gubsu juga mengatakan, Sumut adalah tujuan investasi yang tepat bagi para investor termasuk RRT. "Sumut adalah provinsi ke empat terbesar di Indonesia. Memiliki banyak potensi, pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Kekuatan utama Sumut adalah potensi perkebunan dimana Sumut menduduki posisi ke dua perkebunan sawit di Indonesia," jelas Gubsu.

Gubsu juga mengatakan, Sumut merupakan pusat pengembangan ekonomi Indonesia untuk wilayah Barat. Selain KEK Sei Mangke, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Belawan dan KSN Danau Toba, investor RRT dapat menanamkan modalnya untuk pembangunan bandar udara di sejumlah daerah di Sumut dan jalan tol yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra, pembangunan jalur kereta api.

"Sumut juga kaya akan potensi laut dan kemaritiman karena memiliki pantai barat dan pantai timur. Sumut juga memiliki potensi luar biasa bidang perikanan tangkap maupun budidaya perikanan," sebut Gubsu.

Tidak lupa Erry menawarkan maskapai RRT untuk melayani penerbangan langsung dari RRT ke Bandara Kualanamo Airport International (KNIA) yang selanjutnya terintegrasi ke Bandara Silangit agar dapat mudah menjangkau KSN Danau Toba sebagai Monaco of Asia. "Penerbangan langsung ini akan menjadi pintu gerbang menuju atau dari RRT ke Medan, kemudian menuju kawasan Danau Toba," harap Gubsu.

Sementara Dubes RRT, Xie Feng mengatakan, RRT telah mendengar banyak informasi tentang potensi yang dimiliki Sumut dan sangat memungkinkan untuk dijalin kerjasama. "Oleh karenanya, kami ingin melihat langsung potensi-potensi yang cukup besar yang ada di Sumatera Utara. Terimakasih sudah menerima saya dan rombongan, kehadiran kami untuk mempererat dan lebih meningkatkan hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini," ujar Xie Feng.

Feng mengaku, Sumut merupakan provinsi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal itu didasari oleh sejumlah potensi baik dari populasi penduduk terbesar keempat di Indonesia dan merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat, "Sumatera Utara memang memiliki peran penting perkembangan ekonomi di Indonesia," sebut Feng.

Guna meningkatkan kualitas kerja, Feng menyarankan agar ada pertemuan lebih lanjut untuk membicarakan pekerjaan yang sedang dilakukan para investor dari RRT guna mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan untuk kebaikan hubungan dua negara.

Feng juga mengatakan, pihaknya ingin terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan Indonesia, khususnya dengan Provinsi Sumut memiliki banyak potensi dan untuk pengembangannya masih perlu dukungan dari berbagai pihak dan investor dari luar. "Terimakasih, RRT berharap agar hubungan kerjasama yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan. RRT siap dan terus meningkatkan kualitas pekerjaan," ucap Feng.



KABID APTEL DISKOMINFO PROVSU Dra. ELI SUHAERiyAH, M.Si

Mendampingi Gubsu Menerima Kunjungan Kerja Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Mr. Xie Feng
Ruang Kerja Gubsu, Selasa 28 Juni 2016



EDISI APRIL - JUNI 2016

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

<http://diskominfo.sumutprov.go.id>